

**PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN  
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (DKPP) DI KOTA  
TANGERANG SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Ilmu Manajemen Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

**EVAN QURNI ARDIANA**

**NIM: 6661 082038**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG**

**2013**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Evan Qurni Ardiana

NIM : 6661082038

Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 25 february 1990

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Januari 2013

Evan Qurni Ardiana

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : EVAN QURNI ARDIANA  
NIM : 6661082038  
Judul Skripsi : PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS  
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN  
DI KOTA TANGERANG SELATAN

Serang, 2 Februari 2013

Skripsi ini Telah Disetujui Untuk Diujikan  
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Oman Supriadi M.Si**

NIP. 195806061986031003

**Hj. Ima Maisaroh, S.Ag., M.Si**

NIP. 197203112003122001

Mengetahui,

Dekan FISIP

**Dr. Agus Sjafari., S.Sos., M.Si**

NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : **EVAN QURNI ARDIANA**

NIM : **6661 082038**

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN,  
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (DKPP) DI KOTA TANGERANG  
SELATAN**

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 15 Maret tahun 2013  
dan dinyatakan **LULUS**

Ketua Penguji:

**Rahmawati S.Sos, M.Si**  
NIP. 197905252005012001

Anggota:

**Listyaningsih S.Sos, M.Si**  
NIP. 197603292003123001

Anggota:

**Hi. Ima Maisuroh S.Ag, M.Si**  
NIP. 197203112003122001

Serang, Maret 2013



Mengetahui,

Dekan FISIP Unterta  
  
**Dr. Agus Sjafari S.Sos, M.Si**  
NIP. 197108242005011002

Ketua Prodi Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
  
**Rina Yullanti S.IP, M.Si**  
NIP. 197917152006142011

## ABSTRAK

Evan Qurni Ardiana. 6661082038. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dosen Pembimbing I: Drs. H. Oman Supriadi M.Si. Dosen Pembimbing II: Hj. Ima Maisaroh, S.Ag., M.Si

### **Kata Kunci: Pengelolaan Sampah**

Sampah selalu identik dengan barang sisa atau hasil buang tak berharga. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya, seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, volume sampah dapat menyebabkan tumpukan di beberapa titik sudut kota tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengolahan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen menurut G.R Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan kurang optimal, karena kemampuan SDM pengelola, peralatan dan dana yang tidak memadai sehingga penyelesaian dirasakan kurang efektif, ditambah lagi dengan cara pandang yang salah terhadap sampah yang dianggap sebagai barang tidak berguna. Terdapat beberapa saran yaitu meningkatkan pengadaan fasilitas saran dan prasarana untuk pengelolaan sampah dan pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam sosialisasi pengelolaan sampah tingkat kelurahan serta membutuhkan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **ABSTRACT**

Evan Qurni Ardiana, 6661082038, Waste Management of Departement of Hygiene, Landscaping and Cemetry of South Tangerang City, Public Administration Departement, Faculty of Social and Political Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1<sup>st</sup> Advisor: Drs. H. Oman Supriadi M.Si. 2<sup>nd</sup> Advisor: Hj. Ima Maisaroh, S.Ag., M.Si

### ***Keywords : Waste Management***

*Trash is always associated with the waste or waste results worthless. The higher population growth resulted in the increasing level of consumption as well as other activities, such as those in South of Tangerang city, the volume of waste can cause piles at some point in the corner of the city. The purpose of this study to determine the processing system and the efforts made in tackling the waste problem in South Tangerang city. This research used theory by G.R. Terry is management including planning, organizing, directing and controlling. This study used qualitative methods. The data obtained through interviews, observation and documentation, and use of data analysis techniques by Miles and Huberman. The results of this study indicate waste management in South of Tangerang city less than optimal, because the ability of HR managers, equipment and inadequate funding thus felt less effective settlement, coupled with the wrong perspective of waste is regarded as wastes. There are some suggestions that improve the provision of advice and infrastructure for waste management and the government should be further improved in the socialization of waste management district level and requires the active participation of the community in waste management.*

**Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan**

**Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan**

**Maka apabila engkau telah selesai, maka tegaklah.**

**Dan hanya kepada Tuhan-Mu, hendaklah engkau  
berharap!**

**(Q.S Al – Insyiraah 5-8)**

**Kupersembahkan karya kecilku ini  
teruntuk, Kedua Orang Tuaku, Bapak  
dan Mama tercinta yang selalu  
mendo'akan tiada henti mengiringi  
langkah perjuangan anakmu.  
Semoga bisa menjadi hadiah terindah  
untuk mereka.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul "Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemkaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan."

Penulis menyadari selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali menerima bantuan, bimbingan, dorongan, dan petunjuk nasihat dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Terutama kedua orang tua yang selalu memberi memotivasi, mendoakan, serta memberi dukungan moril ataupun materil agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu perkenankan dengan rendah hati dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Mia Dwiana, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan II Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Gandung Ismanto, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Rina Yulianti, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Drs. H. Oman Supriadi M.Si selaku Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian.
8. Hj. Ima Maisaroh, S.Ag., M.SI selaku Pembimbing Skripsi II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian.
9. Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
10. Kepada Elisa Tanini yang dengan senang hati menemani saya dan selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat tanpa bosan.
11. Kepada teman-teman The Old Players (Rizky Anshari, Azhar Gunawan, Nafier Fathi, Ilham Adi.P, Rizky Hilmawan, Septian dan Dwi Cahya) serta

teman-teman tim Hattrick FC yang dengan senang hati mensupport saya mengerjakan skripsi ini serta bantuan yang diberikan.

12. Crew Konveksi L.A (Babeh, Kang Gagan, Ari regae, Adan, Rusdi, Kang Dharja, Botak, Ande dll) yang selalu memberikan dukungan semangat dan sumber inspirasi
13. Teman-teman MP Kelas C Reguler Angkatan 2008 (Bamzkey, Wacid, Ricko, Edwin, Abdi, Adi, Galih, Risson, Dae, Redo, Udin, Budi, Nitta, Della, Anin, Iin, Ema, Linda, Astri, Nunu, lie mama dhera) yang selalu memberikan saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Drs.H. Chaerul Soleh, M.SI Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan
15. Kepala Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan izin penelitian.
16. H. Abdul Aziz, ST,MT selaku Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan
17. H. Oki Rudianto,S.IP,M.Si selaku Kepala Bidang Kebersihan
18. Mohammad Ihlas,S.STP selaku Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
19. Ir.Deden Supriatna, MM selaku Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah
20. Bahrudin, ST selaku Kasi Sarana dan Prasarana
21. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, dan untuk itu peneliti berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi usaha perbaikan skripsi ini dan nantinya akan penulis terima dengan hati yang tulus demi pengembangan penulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi almamater beserta pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Tangerang, Februari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iv

DAFTAR TABEL ..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 11

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... 12

1.4 Tujuan Penelitian ..... 12

1.5 Manfaat Penelitian ..... 12

1.5.1 Secara Teoritis ..... 12

1.5.2 Secara Praktis ..... 13

1.6 Sistematika Penulisan ..... 13

### BAB II DESKRIPSI TEORI

2.1 Deskripsi Teori .....	17
2.1.1. Definisi Manajemen .....	17
2.1.1.1. Asas-Asas Manajemen .....	20
2.1.1.2. Tujuan Manajemen .....	24
2.1.2. Definisi Perencanaan .....	27
2.1.2.1. Jenis-Jenis Perencanaan.....	29
2.1.3. Definisi Pengorganisasian .....	31
2.1.3.1. Rentang Kendali .....	32
2.1.3.2. Jenis-Jenis Wewenang .....	35
2.1.3.3. Asas Pendelegasian Wewenang .....	36
2.1.4. Definisi Pengarahan .....	39
2.1.4.1. Komunikasi .....	40
2.1.4.2. Kepemimpinan .....	41
2.1.4.3. Motivasi .....	42
2.1.5. Definisi Pengendalian .....	43
2.1.5.1. Asas-Asas Pengendalian .....	44
2.1.6. Pengertian Sampah .....	45
2.1.6.1. Jenis Sampah .....	46
2.1.6.2. Karakteristik Sampah .....	47
2.1.7. Sumber-Sumber Sampah .....	48
2.1.8. Pengelolaan Sampah Padat.....	50
2.2. Kerangka Berfikir .....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	57
3.2 Instrumen Penelitian .....	58
3.3 Sumber Data .....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.4.1 Pengamatan/Observasi .....	59
3.4.2. Wawancara .....	60
3.4.3 Studi Dokumentasi .....	63
3.5 Penentuan Informan .....	63
3.6 Teknik Analisis Data .....	65
3.6.1 Data Reduction .....	65
3.6.2 Data Display .....	66
3.6.3 Conclusion Drawing .....	66
3.7 Uji Kredibilitas Data .....	67
3.7.1 Triangulasi .....	68
3.7.2 Member Check .....	69
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	70

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	72
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Selatan .....	72

4.1.2 Gambaran Umum DKPP Kota Tangerang Selatan .....	75
4.1.2.1 Visi dan Misi .....	75
4.1.2.2 Tupoksi DKPP Kota Tangerang Selatan .....	76
4.1.2.3 Struktur Organisasi DKPP Kota Tangerang Selatan .....	77
4.1.2.4 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian Bidang Kebersihan .....	78
4.1.2.5 Tupoksi Bidang Kebersihan.....	81
4.1.3 Gambaran Umum TPA Cipeucang .....	83
4.2. Informan Penelitian .....	84
4.3 Deskripsi Data .....	86
4.4 Analisis Hasil Penelitian .....	88
4.4.1 Perencanaan .....	89
4.4.1.1 Sistem Operasi Pengelolaan Sampah .....	89
4.4.1.2 Sistem Pengelolaan Sampah .....	92
4.4.1.2.1 Pengomposan .....	92
4.4.1.2.2 Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat.....	95

4.4.1.3 <i>Budgeting</i> (Pembiayaan)	104
4.4.2 Pengorganisasian	109
4.4.2.1 Kelembagaan	109
4.4.2.2 Struktur Organisasi dan Kerja Sama antar Stakeholder	113
4.4.3 Pengarahan	115
4.4.3.1 Style (Gaya Kepemimpinan)	115
4.4.4 Pengawasan	121
4.4.4.1 Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan	121
4.4.4.2 Peran Serta Masyarakat	126
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	137

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan	141
5.2 Penutup	142



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	58
3.1 Siklus Teknis Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.....	67
4.1 Struktur Organisasi Bidang Kebersihan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan .....	81
4.2 Pengomposan Dengan Open Windrow System .....	98
4.3 Usulan Struktur Organisasi Pengelola Kebersihan Berbentuk Dinas .....	117
4.4 Kondisi TPA Cipeucang Saat Revitalisasi .....	139
4.5 Kondisi Akses Jalan Menuju TPA .....	140

## DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Komposisi Sampah di Kota Tangerang Selatan .....	6
1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana DKPP Kota Tangsel .....	10
3.1 Pedoman Wawancara .....	62
3.2 Daftar Informan .....	64
3.3 Jadwal Penelitian .....	71
4.1 Jumlah Kelurahan dan Desa PerKecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 .....	73
4.2 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Water Treatment Plant (WTP) di Kota Tangerang Selatan .....	75
4.3 Struktur Organisasi Bidang Kebersihan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan .....	83
4.4 Daftar Informan .....	89
4.5 Komponem-Komponem Biaya Tetap danVariabel Dalam Proses Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah .....	111
4.6 Estimasi Coba-Coba Komponem-Komponem Biaya Tetap Dalam Proses Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah .....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Implikasinya terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis. Pada perkembangan pelaksanaan otonomi daerah baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, aspek peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu tema sentral bagi semua daerah.

Pemekaran daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398

kabupaten, dan 93 kota. Adanya dampak positif dan negatif dari proses pemekaran wilayah yang lebih menunjukkan kebhinekaan ini memang merupakan konsekuensi logis yang akan muncul sebagai implikasi dari adanya suatu kebijakan. Dari dampak positif secara normatif adanya pemekaran daerah otonom, maka dari pendekatan lokal, akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. Aspek positif lainnya, alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Sumber: [www.wikipedia.com/pemekaran-wilayah-kota](http://www.wikipedia.com/pemekaran-wilayah-kota), Selasa 28 Februari 2012)

Dari implikasi negatif, sejumlah pihak menyimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah otonom di era reformasi mengalami kegagalan, antara lain, karena pemekaran daerah tidak dapat menjawab persoalan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Pemekaran dilaksanakan tanpa perencanaan matang, berlatarbelakang keagamaan, kesukuan dan subyektif, serta kepentingan elit sesaat untuk berbagi kekuasaan dan posisi jabatan publik. Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi dampak lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran.

Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negative maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup (Zulidamel, 2010: 117).

Salah satu persoalan yang dihadapi manusia di kota-kota besar adalah masalah sampah. Pencemaran timbul disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas/kegiatan manusia yang beraneka ragam. Sejalan dengan perkembangan kota, volume sampah inipun meningkat secara drastis dan jenis sampahnya semakin beraneka ragam. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Setiap manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Terutama produksi sampah-sampah rumah tangga yang cenderung sulit diuraikan.

Dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota selain kesemrautan kawasan, setiap daerah yang melakukan pemekaran kurang memperhatikan tempat pembuangan sampah yang baik, dan ramah lingkungan, yang tidak mengganggu aktivitas warganya. Walaupun sepele, tapi masalah ini akan menjadi seperti bom waktu kalau penanganannya kurang serius dari pihak Pemkot setempat. Seperti yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang sudah empat tahun memisahkan diri dengan Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai kota yang memiliki daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No.51 tahun 2008 yang meliputi 7 kecamatan yaitu kecamatan Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan kecamatan Setu. Sebagai kota baru, kota Tangerang Selatan memiliki sejumlah permasalahan baik secara fisik, lingkungan, maupun sosial budaya masyarakat. Salah satu isu strategis permasalahan kota Tangerang Selatan sesuai dengan tupoksi DKPP adalah belum optimalnya penanganan masalah persampahan terutama terkait dengan penetapan lokasi TPA dan sistem pengelolaan sampah yang akan dikembangkan (mengacu pada UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah). Mengingat UU No.51 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, usia pemerintahan kota Tangerang Selatan terbilang masih muda, sehingga masih banyak sektor pelayanan masyarakat yang perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan di sektor pengelolaan persampahan.

Pada saat ini penanganan permasalahan sampah di wilayah kota Tangerang Selatan belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan

kurangnya sarana dan prasarana pendukung kebersihan, seperti kekurangan alat berat dalam pengangkutan sampah. Masyarakat kota Tangerang Selatan juga masih mengeluhkan pelayanan sampah yang kurang memuaskan karena masih ada beberapa titik sampah yang belum terangkut dengan baik, seperti yang terlihat selama empat tahun terakhir ini tumpukan sampah di sejumlah titik Kota Tangerang Selatan menjadi pemandangan sehari-hari yang mau tidak mau harus disaksikan warga Kota Tangerang Selatan sendiri. Tumpukan sampah itu hingga saat ini masih terlihat di Pasar Ciputat, Pasar Serpong, Pasar Jombang, Pasar Pamulang, Jalan Raya Serpong, Alam Sutera dan Pondok Jagung.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai permasalahan sampah yang difokuskan pada masalah pengelolaan sampah oleh DKPP Kota Tangerang Selatan. Pada Pasal 3 UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Amanat Undang-Undang tersebut jelas memberi tugas dan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak DKPP selaku dinas yang bertanggung jawab segera melakukan tindakan dalam bidang pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Komposisi sampah di kota-

kota di Indonesia didominasi oleh sampah organik, yaitu berkisar 70%. Sampah organik memiliki karakter mudah terurai menjadi senyawa organik sederhana dalam bentuk cair dengan kandungan BOD berkisar 1500 mg/l, sangat jauh di atas baku mutu yang disyaratkan. Berdasarkan data dari DKPP, volume sampah di Kota Tangerang Selatan setiap harinya mencapai 1600 meter kubik, yang berasal dari pasar dan rumah tangga. Adapun komposisi sampah di Kota Tangerang Selatan terdiri dari berbagai sumber, yaitu:

**Tabel 1.1 Komposisi Sampah di Kota Tangerang Selatan**

<b>N0</b>	<b>Jenis</b>	<b>Sumber</b>	<b>Persentase ( % )</b>
1	Non Organik	Kertas	8,2
		Kayu	3,12
		Kain	3,50
		Karpet/Kulit	0,5
		Plastik	13,08
		Metal/Logam	1,35
		Glass	1,08
		Tulang	1,05
		Lain-lain	2,2
2	Organik	Rumah Tangga	40
		Pasar	10
		Kegiatan Komersil	5,52
		Kegiatan Industri	5
		Taman, jalan, sungai	5,4

(Sumber DKPP, 2011)



Berdasarkan data diatas, ternyata presentase sumber sampah di Kota Tangerang Selatan tertinggi yang berasal dari jenis non organik bersumber dari plastik. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa plastik yang paling sering dimanfaatkan bagi masyarakat karena selain mudah didapatkan, plastik adalah salah satu bentuk barang yang paling sederhana dan banyak memberikan manfaat, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan presentase sumber sampah di Kota Tangerang Selatan tertinggi yang berasal dari jenis organik yaitu bersumber dari rumah tangga. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa sampah kebanyakan bersumber dari sisa-sisa pemakaian atau produk di rumah-rumah masyarakat yang diperoleh dari manapun.

Dengan semakin hari semakin bertambahnya volume sampah di daerah Kota Tangerang Selatan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang akan dijalankan oleh pihak DKPP dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan tersebut, terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKPP Kota Tangerang Selatan, yaitu:

*Pertama*, Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, masih terkendala masalah lahan. Pemkot Tangsel baru melakukan pembebasan lahan seluas dua hektare. TPA Cipeucang seharusnya dibangun di atas lahan seluas 10 hektare agar dapat berfungsi secara maksimal untuk menampung sampah warga. Tetapi, Pemkot Tangsel masih mengalami

kesulitan untuk melakukan pembebasan lahan seluas delapan hektare sisanya. Sampah masih menjadi masalah utama Tangsel setelah berpisah dari Kabupaten Tangerang.

Tidak adanya TPA membuat tumpukan sampah terlihat di pinggir jalan dan pasar. Di Pasar Ciputat misalnya, ada tumpukan 70 meter kubik setiap harinya. Warga pun harus rela mencium bau sampah setiap kali melewati tumpukan sampah tersebut. Karena itu, keberadaan TPA Cipeucang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pemkot Tangsel juga mendapat bantuan dana sebesar Rp 9 Miliar dari pemerintah pusat untuk pembebasan lahan. Namun pengoperasian TPA Cipeucang terus tertunda. Pemkot Tangsel akan melakukan pembebasan secara bertahap, sehingga pengoperasiannya juga dapat dilakukan secara bertahap. Karena itu sistem dan manajemen TPA cipeucang harus diperhitungkan secara benar. Setiap lubang untuk *sanitary landfill* harus dihitung secara tepat.

TPA yang dijadwalkan akan berfungsi tahun 2013 ini ternyata jauh dari perkiraan, karena sampai saat ini saja tahap revitalisasi TPA tersebut belum sepenuhnya rampung, terlihat dari fondasi kolam-kolam sampah dan kolam-kolam untuk penampungan air lindi belum selesai. Dari observasi awal yang peneliti lakukan pembangunan TPA Cipeucang ini cukup ada kemajuan, dimana sebelum kolam-kolam sampah itu direnovasi, tempat tersebut adalah tumpukan sampah yang menggunung, terlihat sekali sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk tanpa adanya penanganan lebih lanjut, atau pada saat itu TPA Cipeucang masih menggunakan metode *Open*

*Dumping* yaitu, pembuangan sampah dilakukan begitu saja di lahan terbuka tanpa upaya dilakukan pemadatan atau penutupan dengan tanah, jadi sampah hanya dibiarkan begitu saja menunggu secara otomatis dengan sendirinya, tanpa adanya penanganan lebih lanjut.

Sekarang tempat yang awalnya adalah tumpukan sampah yang menggunung sudah menjadi kolam sampah dimana dilakukan penutupan dengan tanah atau batu-batu kerikil. Apabila dikaitkan dengan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yaitu sampah harus dipilah dari sumbernya dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), selanjutnya residunya diangkat ke tempat pemrosesan akhir (TPA), dan kalau tidak dilayani dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

*Kedua*, sarana dan prasarana yang dimiliki pihak DKPP Kota Tangsel masih kurang mendukung untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah. Jadi masih terdapat kekurangan kendala-kendala yang dihadapi dari sarana dan prasarana yang telah tersedia. Adapun sarana dan

prasarana yang telah dimiliki oleh pihak DKPP Kota Tangsel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana DKPP Kota Tangsel**

	<b>JENIS ASET</b>	<b>JUMLAH</b>	
	<b>I. ALAT ANGKUT</b>		
1	Amroll Truk / Roda Enam	9	Unit
2	Tangki air	1	Unit
3	Sky Life / Mobil Tangga	1	Unit
4	Mobil Tangga Portable	1	Unit
5	Truk Dozer	1	Unit
	<b>II. SARANA ANGKUTAN</b>		
1	Back Container	70	Unit
2	Gerobak Sampah	35	Unit

(Sumber, DKPP, 2011)

Berdasarkan data di atas terlihat kurangnya sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah di wilayah Kota Tangsel kurang begitu memadai, karena minimnya armada pengangkut sampah yang berjumlah sembilan unit, sehingga proses pengangkutan sampah menjadi kurang optimal. Terlihat tumpukan sampah di pinggir jalan dan pasar, seperti yang terjadi di Pasar Pasar Ciputat sebanyak 70 meter kubik per hari. Pasar Cimanggis sebanyak 40 meter kubik, Serpong sebanyak 30 meter kubik per hari, Pasar Jombang sebanyak 30 meter kubik per hari, Pasar Bintaro Lama

dan Baru sebanyak 30 meter kubik per hari, Pasar Modern BSD sebanyak 30 meter kubik perhari, pasar Kaget Sabtu-Minggu dan Bundaran Bintaro sebanyak 10 meter kubik per hari. Keadaan tersebut diperburuk dengan dilakukannya penarikan 40 truck sampah oleh pihak Pemkab Tangerang.

Melihat permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka membuktikan bahwa kurangnya peran DKPP Kota Tangsel dalam menangani dan mengelola permasalahan sampah di wilayah tersebut, sebagai upaya mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang bersih, hijau, gemerlap dan teratur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, masih terkendala masalah lahan. Sehingga tahap revitalisasi TPA belum sepenuhnya rampung.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan masih kurang mendukung untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini mengenai Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan. Kemudian mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Secara Teoritis**

- a. Menambah informasi tentang bagaimana upaya pihak Pemkot Tangsel dalam pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan masalah kepada warganya

- b. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian lebih dalam lagi mengenai penanggulangan masalah sampah menuju Kota Tangerang Selatan yang modern, cerdas dan religius.

#### **1.5.2 Secara Praktis**

- a. Bagi pemerintah daerah setempat, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis dan bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah untuk mengeluarkan Perda pelarangan membuang sampah disembarang tempat menuju Kota Tangerang Selatan yang modern, cerdas dan religius.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran mereka tentang pola hidup sehat, dengan membuang sampah pada tempatnya demi menjaga keindahan, kebersihan dan kenyamanan warga yang bermukim di daerah Kota Tangerang Selatan

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum sehingga menitik ke masalah yang paling spesifik dan menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam hal ini mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian atau dengan masalah. Untuk mengidentifikasi masalah peneliti biasanya melakukan observasi terlebih dahulu.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

Batasan dan rumusan masalah dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang paling berkaitan dengan judul penelitian dan berbentuk dalam kalimat pertanyaan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Maksud tujuan penelitian dalam hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari bab per bab yang termuat dalam penelitian.

## **BAB II DESKRIPSI TEORI**

Pada Bab ini terdapat deskripsi teori, kerangka berfikir, dan asumsi dasar. Deskripsi teori mengkaji tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan. Kerangka berfikir menceritakan alur pikiran peneliti dalam



penelitian, sedangkan asumsi dasar adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian.

#### **3.2 Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang digunakan, sumber data yang diperoleh dan teknik pengumpulan data.

#### **3.3 Sumber Data**

Pada sub ini menjelaskan tentang sumber-sumber data yang mendukung dari proses penelitian itu sendiri.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada sub ini menjelaskan tentang pengumpulan data melalui pengamatan/observasi, wawancara, dokumen dan bahan-bahan visual

#### **3.5 Penentuan Informan**

Pada sub ini menjelaskan tentang penentuan narasumber atau informan yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian

#### **3.6 Uji Kredibilitas Data**

Pada sub ini menjelaskan tentang pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam menguji kredibilitas data yaitu triangulasi dan *member check*.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Pada sub ini menjelaskan tentang teknik yang digunakan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil temuan dilapangan. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Pada sub ini menjelaskan dimana lokasi penelitian dilakukan dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.

## BAB II

### DESKRIPSI TEORI

#### 2.1 Deskripsi Teori

##### 2.1.1 Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita.

1. Apa yang diatur?  
Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, methods, materials, machines and markets*, disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu.
2. Kenapa harus diatur?  
Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.
3. Siapa yang mengatur?  
Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.
4. Bagaimana mengaturnya?  
Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian = *planning, organizing, directing, and controlling*).
5. Dimana harus diatur?  
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya.  
(Sumber: Hasibuan, 2009:1)

Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan dan atau laba (profit). Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan "alat dan wadah" saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Menurut Hasibuan (2009:2) mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan G.R. Terry berpendapat:

*"Management is a distinct process of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and others resources"*

(Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya). (Hasibuan: 2009: 3)

Istilah manajemen diartikan secara oleh para ahli, tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut. Manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem Administrasi Publik. Manajemen merupakan penggerak administrasi publik dan hendaklah diartikan sebagai integrasi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Manajemen adalah suatu sistem, karena itulah jika satu sub sistemnya kurang berperan dengan baik, akan terjadi keliru kelola.

Menurut Shafritz dan Russel dalam T. Keban (2008: 92) mendefinisikan manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumberdaya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Donovan dan Jackson dalam T. Keban (2008: 92) memandang manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (skill) dan sebagai serangkaian tugas.

Selain itu, H. Koontz & O' Donnel dalam Handyaningrat (1994: 19) mengemukakan definisi manajemen yaitu manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Dalam definisi ini, manajemen dititikberatkan pada usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang didalam organisasi harus jelas wewenang, tanggungjawab dan tugas pekerjaannya. Dan Abdurrahmat fathoni (2006: 5) menyatakan bahwa pada umumnya hakikat manajemen adalah proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian dan pemberian fasilitas lainnya.

1. Proses pengarahan (*process of directing*), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan pencapaian tujuan.
2. Proses pemberian fasilitas kerja (*process of facilitating the work*), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan.

3. Proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Batasan manajemen, prosesnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Perencanaan merupakan penetapan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidaknya dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Dengan demikian, dari beberapa definisi manajemen di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau cara pengarahan atasan terhadap bawahan dan pemberian fasilitas dengan menggunakan sumber daya-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.1.1 Asas-Asas Manajemen**

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan "intisari" kebenaran-kebenaran dasar ilmu bidang tersebut. Asas adalah dasar tetapi bukanlah sesuatu yang absolut atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Asas bukanlah hukum atau dogma, tetapi hanya sebagai hipotesa yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis, relevan dan konsisten. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar dalam

menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar. Manajer secara beralasan dapat meramalkan hasil-hasil usaha kegiatan-kegiatannya.

Menurut Henry Fayol dalam Hasibuan (2009: 9) asas-asas umum manajemen adalah sebagai berikut:

1. *Division of work* (asas pembagian kerja)

Asas ini sangat penting, karena adanya limit faktor, artinya adanya keterbatasan-keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu:

- a. Keterbatasan waktu
- b. Keterbatasan pengetahuan
- c. Keterbatasan kemampuan
- d. Keterbatasan Perhatian

Keterbatasan-keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaan. Tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan. Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan pada setiap organisasi karena tanpa pembagian kerja berarti *tidak* ada organisasi dan kerja sama di antara anggotanya. Dengan pembagian kerja maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan.

2. Authority and Responsibility

Menurut asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan : wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya wewenang sebesar X maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang (*authority*) menimbulkan "hak", sedangkan tanggung jawab menimbulkan "kewajiban". Hak dan kewajiban adanya interaksi atau komunikasi anatara atasan dan bawahan.

3. Discipline

Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya.

4. Unity of Command

Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab kepada seorang atasan pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu, karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan maka ia akan bingung.

#### 5. Unity of Direction

Setiap orang (sekelompok) bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. *Unity of command* berhubungan dengan karyawan, sedangkan *unity direction* bersangkutan dengan seluruh perusahaan.

#### 6. Subordination of Individual Interest into General Interest

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (organisasi), di atas kepentingan pribadi. Misalnya pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan dari pada pekerjaan sendiri.

#### 7. Remuneration of Personnel

Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan.

#### 8. Centralization

Setiap organisasi harus memiliki pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagi tanpa mengabaikan situasi-situasi khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. *Centralization* ini sifatnya dalam arti relative, bukan absolut (mutlak).

#### 9. Scalar of Chain (Hierarchy)

Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas kebawah harus merupakan mata rantai vertical yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan.

#### 10. Order

Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya.



#### 11. Equity

Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam memberikan gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasannya.

#### 12. initiative

Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.

#### 13. Esprit de Corps (Asas Kesatuan)

Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujudnya kekompakan kerja (*team work*) dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pemimpin perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa, supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu.

#### 14. Stability of Turn-over Personnel (Kestabilan Jabatan Perusahaan).

Menurut asas ini, pemimpin perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidak stabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pemimpin perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai pensiunnya. Jika karyawan sering berhenti perlu manajer menyelidiki penyebabnya. Apakah gaji terlalu kecil, perlakuan yang kurang baik, dan lain sebagainya?

Para perintis manajemen lainnya adalah : Alexei Stakhanov (1935) dari Rusia, Robert Owen (1771-1858) dari Skotlandia yang dijuluki sebagai Bapak Manajemen Personalia, Charles Babbage (1792-1871) dari Inggris, dan lain-lain.

Sejak *time and motion study* dari F.W.Taylor dan teori-teori yang dikemukakan oleh Henry Fayol maka secara resmi manajemen diakui sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang dapat sisejajarkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan dikelompokkan kedalam ilmu pengetahuan sosial. Hal ini disebabkan karena manajemen telah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan (*science*).

Kesimpulannya bahwa asas (prinsip) adalah kebenaran umum yang memberikan dasar pemikiran, keyakinan, dan pedoman pemecahan

problem, pelaksanaannya fleksibel serta disesuaikan dengan situasi, kebutuhan, dan keadaan-keadaan khusus. Jadi tidak semua asas tersebut data berlaku.

#### 2.1.1.2 Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non materi dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan/pengabdian (*public organization*) melalui proses manajemen itu.

Apakah pengertian tujuan (*objectives*) sama dengan sasaran (*goals*) ? Pengertian antara tujuan (*objectives*) dengan sasaran (*goals*) mempunyai perbedaan yang gradual saja. *Tujuan* maknanya hasil yang umum (*generalis*), sedangkan *sasaran* berarti hasil khusus (*spesialis*). Tujuan adalah suatu hasil (*generalis*) yang ingin dicapai melalui proses manajemen (*Penulis*). Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer (G.R.Terry dalam Hasibuan 2009:17). jadi mencakup empat pokok, yaitu : 1. Tujuan, 2. Skop, 3. Kepastian, 4. Arah.

Sasaran (*goals*) adalah sesuatu hasil (khusus) yang ingin dicapai melalui proses manajemen. Misalnya, pertandingan bola kaki, jika hanya ingin menang (sasaran = *goals*) ini akan dapat

dicapai seperti main kasar, tidak sportif, dan menghalalkan segala cara. Tetapi jika tujuan (*objectives*) menang yang ingin dicapai, kemenangan ini diperoleh dengan bermain sportif dan cantik sehingga memuaskan para penontonnya. Jadi tujuan tercapai, dan para penonton (konsumen) merasa puas.

Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realitis, dan cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika tujuan jelas, realitas, dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup besar. Sebaliknya, jika ditetapkan terlalu mudah atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi, semangat kerja karyawan akan termotivasi, kalau tujuan ditetapkan jelas, realistik, dan cukup menantang untuk dicapainya.

Dalam menetapkan tujuan ini harus didasarkan pada analisis “data, informasi, dan potensi” yang dimiliki serta memilihnya dari alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi dapat diketahui dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)-nya.

Menurut Hasibuan (2009:17) tujuan-tujuan ini dapat kita kaji dari beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut :

1. Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas :
  - a. *Profit objectives*, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya.

- b. *Service objectives*, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
  - c. *Social objectives*, bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan.
  - d. *Personal objectives*, bertujuan agar para karyawan secara individual *economic, social psychological* mendapatkan kepuasan-kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaan.
2. Menurut prioritasnya, tujuan dibagi atas :
    - a. Tujuan primer
    - b. Tujuan sekunder
    - c. Tujuan individual dan
    - d. Tujuan sosial
  3. Menurut jangka waktu, tujuan dibagi atas :
    - a. Tujuan jangka panjang
    - b. Tujuan jangka menengah dan
    - c. Tujuan jangka pendek
  4. Menurut sifatnya, tujuan dibagi atas :
    - a. *Management objectives*, tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer.
    - b. *Managerial objectives*, tujuan yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas-kreativitas yang bersifat manajerial.
    - c. *Administrative objectives*, tujuan-tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi.
    - d. *Economic objectives*, tujuan-tujuan yang bermaksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya.
    - e. *Social objectives*, tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral.
    - f. *Technical objectives*, tujuan beberapa detail teknis, detail kerja, dan detail karya.
    - g. *Work objectives*, yaitu tujuan-tujuan yang merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan
  5. Menurut tingkatannya, tujuan dibagi atas :
    - a. *Overall enterprise objectives*, adalah tujuan semesta (generalis) yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan.
    - b. *Divisional objectives*, adalah tujuan yang harus oleh setiap divisi.
    - c. *Departemental objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap masing-masing bagian.
    - d. *Sectional objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi.

- e. *Group objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap kelompok urusan.
6. Menurut bidangnya, tujuan dibagi atas :
- a. *Top level objectives*, adalah tujuan-tujuan umum, menyeluruh, dan menyangkut berbagai bidang sekaligus.
  - b. *Finance objectives*, adalah tujuan-tujuan tentang modal.
  - c. *Production objectives*, adalah tujuan-tujuan tentang produksi.
  - d. *Marketing objectives*, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan jasa-jasa.
  - e. *Office objectives*, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang ketatausahaan dan administrasinya.
7. Menurut motifnya, tujuan dibagi atas :
- a. *Public objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang Negara.
  - b. *Organizational objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan statuta organisasi yang bersifat zakelirk dan impersonal (tidak boleh berdasarkan pertimbangan perasaan atau selera pribadi) dalam upaya pencapaiannya.
  - c. *Personal objectives*, adalah tujuan pribadi/individual (walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi) yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi. (Sumber: Hasibuan, 2009:17)

Kesimpulannya bahwa tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja, tujuan beraneka ragam macam, tetapi harus ditetapkan secara jelas, realistis, dan cukup menantang berdasarkan analisis data, informasi, dan pemilihan dari alternatif-alternatif yang ada. Kecakapan manajer dalam menetapkan tujuan dan kemampuannya memanfaatkan peluang, mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya.

### 2.1.2 Definisi Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun

harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.

Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah "memilih", artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternative yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. G.R Terry dalam Hasibuan (2009:92) berpendapat:

*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results.*

(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.)

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama, perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan, dan harus dipikirkan matang-matang tentang anggaran, kebijaksanaan, program, metode dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

### 2.1.2.1 Jenis-Jenis Rencana

#### 1. Tujuan (Objective)

Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan sejas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Tujuan yang diinginkan itu juga harus wajar, rasional, ideal, dan cukup menantang untuk diperjuangkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. Tegasnya, tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan, supaya perencanaan itu tidak mengembang.

Perlu disadari bahwa tanpa tujuan yang ingin dicapai berarti proses manajemennya juga tidak ada, menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:96) berpendapat bahwa, Tujuan (*objective*) adalah suatu sasaran manajerial yaitu tujuan yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah pada usaha-usaha seorang manajer. Sasaran (*goal*), skopnya lebih kecil dari pada tujuan, titik tertentu yang dicapai.

#### 2. Prosedur

Prosedur-prosedur juga merupakan suatu jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas-aktivitas masa depan. Prosedur benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk untuk tindakan dan bukan untuk cara berfikir. Prosedur memberikan detail-detail tindakan, sehingga suatu aktifitas tertentu harus dilaksanakan. Esensinya adalah rentetan tindakan yang diatur secara kronologis atau berurutan. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:98) berpendapat bahwa:

*"A procedure is a series related tasks that make up the chronological sequence and the established way of performing the work to be accomplished."*

(Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian itu harus dilaksanakan.)

Penetapan prosedur dalam rencana adalah penting, supaya pelaksanaan kerja tidak simpang-siur. Banyak kelambatan dan kemandekan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh kurang tertibnya prosedur kerja. Kebijakan akan memberikan bimbingan untuk "berpikir" dalam menentukan suatu keputusan. Prosedur juga memberikan bimbingan akan tetapi sifat bimbingannya jelas dan secara nyata harus dipakai sebagai pedoman dalam hal "bertindak". Kebijakan membutuhkan "interpretasi" dalam penggunaannya sedangkan prosedur tidak.

Menurut Billy E. Goetz dalam Hasibuan (2009:100), Kebijakan bersifat umum, merupakan rencana-rencana manajer yang permanen, sedang prosedur tidak bersifat umum tetapi juga permanen. Suatu kebijakan menggambarkan lapangan untuk bertindak. Ia menentukan tujuan dan membatasi lapangan tindakan. Prosedur menentukan jalan dan urutan tindakan melalui kebijakan-kebijaksanaan dan prosedur ini menciptakan jalan ke arah tujuan. Rangkaian (tujuan) tindakan merupakan *in-quinon*, artinya suatu tindakan adalah lanjutan dari tindakan lain sebelumnya, dengan demikian proses ini merupakan urutan-urutan/kronologi kejadian.

### 3. Program

Program adalah satu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Rencana ini konkret, karena dalam "program sudah tercantum, baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggarannya". Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

Suatu rencana umumnya meliputi bidang-bidang "produksi, finansial, personalia, dan pemasaran" yang masing-masing disusun dalam berbagai program, dan setiap program ini harus saling menunjang pelaksanaan berbagai macam program itu.

### 4. Metode

Metode merupakan hal yang fundamental bagi setiap tindakan dan berhubungan dengan prosedur. Suatu prosedur terdiri dari serangkaian tindakan. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:102) mengemukakan bahwa:

*"A method can be defined as the of determining manner of work performance of a task giving consideration of the objectives, facilities available and total expenditures of time, money and effort."*

(Suatu metode dapat didefinisikan sebagai hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang, dan usaha.)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen baru dapat dikatakan ada, jika ada rencana atau tujuan didalamnya, pelaksanaan proses manajemen akan lebih mudah dan baik, jika



rencananya baik, jelas dan terinci karena suatu rencana menjadi dasar dan alat pengendalian, dengan begitu dampak atau hasil baru dapat diketahui pada masa datang setelah rencana itu dilaksanakan

### 2.1.3 Definisi Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (*organizing*=pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian pengorganisasian (*organizing*) dan organisasi (*organization*) berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

*Organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:119) berpendapat bahwa:

*“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.”*

(Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus membuat struktur organisasi, digantungkan atau diinformasikan pada tempat yang mudah dilihat oleh karyawan, sehingga mereka mengetahui hubungan-hubungan yang terdapat dalam organisasi tersebut

#### 2.1.3.1 Rentang Kendali

Rentang kendali (*span of management = span of control = span of executive = span of authority*) sangat perlu dalam pengorganisasian, karena berhubungan dengan pembagian kerja, koordinasi, dan kepemimpinan seorang pemimpin (manajer). Kenapa rentang kendali perlu dalam suatu organisasi? Rentang kendali perlu dalam suatu organisasi, karena adanya "*limits factor (keterbatasan)*" manusia, yaitu keterbatasan *waktu, pengetahuan, kemampuan, dan perhatian*.

1. Keterbatasan waktu, artinya bahwa pada saat yang bersamaan seorang pemimpin tidak dapat melakukan pekerjaan yang beraneka macam. Misalnya pada jam yang sama tidak mungkin manajer mengerjakan dua pekerjaan, karena itu perlu diberikan kepada orang lain.
2. Keterbatasan pengetahuan, artinya bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat mengetahui semua pekerjaan dalam perusahaan, karena itu perlu diadakannya pembagian pekerjaan kepada bawahannya.
3. Keterbatasan kemampuan, artinya bahwa seorang pemimpin perusahaan kemampuannya terbatas, karena itu perlu diadakan batas jumlah bawahan langsungnya.

4. Keterbatasan perhatian, artinya bahwa seorang pemimpin terbatas perhatiannya, ia tidak dapat memperhatikan semua masalah yang dilakukan bawahannya, sehingga perlu diadakan pembatasan jumlah bawahan langsung yang dipimpinnya. (Hasibuan 2009:133)

Menurut Drs. H Malayu S.P Hasibuan dalam Hasibuan (2009:133) rentang kendali seorang pemimpin jumlahnya relatif, tetapi idealnya antara 3 sampai 9 orang. Faktor-faktor yang dapat membatasi besar-kecilnya rentang kendali, adalah :

1. Sifat dan terincinya rencana.
2. Latihan-latihan dalam perusahaan.
3. Posisi pemimpin dalam struktur organisasi.
4. Dinamis atau statisnya organisasi.
5. Kemampuan dan kecanggihan komunikasi.
6. Tipe pekerjaan yang dilakukan.
7. Kecakapan dan pengalaman manajer.
8. Tingkat kewibawaan dan energi manajer.
9. Dedikasi dan partisipasi bawahan.

#### 1. Sifat dan Terincinya Rencana

Untuk rencana jangka pendek dan terinci secara mendetail, misalnya ada buku petunjuk untuk mengerjakan pekerjaan (tugas) maka rentang kendali seorang manajer semakin banyak, karena pengarahan dan pengendalian relatif mudah. Sebaliknya untuk rencana jangka panjang dan kurang terinci, rentang kendali seorang manajer sedikit, karena pengarahan dan pengendaliannya harus lebih banyak.

#### 2. Latihan-latihan dalam Perusahaan

Lathan akan kan keahlian, keterampilan, dan moral kerja karyawan, Jika latihan-latihan sering diadakan dalam perusahaan maka rentang kendali seorang manajer semakin banyak. Sebaliknya jika latihan-latihan kurang atau tidak pernah diadakan maka rentang kendali seorang manajer sedikit.

#### 3. Posisi Pemimpin dalam Struktur Organisasi

Dinamis tinggi posisi (kedudukan) seorang manajer dalam organisasi maka rentang kendalinya semakin sedikit. Sebaliknya

semakin rendah posisi seorang manajer dalam struktur organisasi maka rentang kendalinya semakin banyak. Inilah sebabnya *organization chart* semakin kebawah, semakin melebar.

#### 4. Dinamis dan Statisnya Organisasi

Jika organisasi dinamis maka rentang kendali seorang manajer semakin sedikit. Sebaliknya jika organisasi statis (cara-cara kerja rutin) maka rentang kendali seorang manajer semakin banyak.

#### 5. Kemampuan dan Andalnya Alat Komunikasi

Jika seorang manajer komunikasinya efektif dan dibantu andalnya alat komunikasi maka rentang kendalinya semakin banyak. Sebaliknya seorang manajer yang berkomunikasi kurang efektif dan alat-alat komunikasinya kurang baik maka rentang kendalinya sedikit. Kesanggupan seorang manajer untuk menyampaikan rencana-rencana dan perintah-perintah juga akan memperbanyak rentang kendalinya.

#### 6. Tipe Pekerjaan yang Dilakukan

Jika perjaan yang akan dilakukan relative mudah, rutin, dan risikonya kecil maka rentang kendali seorang manajer banyak. Sebaliknya jika pekerjaan yang akan dikerjakan itu sulit, risikonya besar, sehingga memerlukan ketelitian, pengarahan, dan pengendalian yang cermat maka rentang kendali seorang manajer sedikit.

#### 7. Kecakapan dan Pengalaman Manajer

Kecakapan dan pengalaman seorang manajer juga ikut menentukan banyak/sedikitnya rentang kendali. Manajer yang cakap dan berpengalaman, rentang kendalinya banyak, demikian sebaliknya.

#### 8. Tingkat kewibawaan dan Energi Manajer

Energi dan kewibawaan seorang manajer juga akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya rentang kendali. Semakin besar energi dan kewibawaanya seorang manajer maka entang kendalinya akan semakin banyak. Sebaliknya manajer yang kurang energy dan kurang berwibawa maka rentang kendalinya sedikit. Energi, diartikan baik fisik maupun mentalnya memungkinkan seorang *executive* dapat melakukan tugas-tugasnya. Kewibawaan, artinya manajer tersebut memiliki *personality authority* karena perilaku, kecakapan, dan kemampuannya.

#### 9. Dedikasi dan Partisipasi Bawahan

Tingkat dedikasi dan partisipasi bawahan akan menentukan gairah semangat kerja dan kedisiplinan. Jika dedikasi dan

pertisipasi bawahan baik maka rentang kendali seorang manajer semakin banyak dan sebaliknya. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Organisasi adalah pembinaan wewenang, dimaksudkan untuk mencaai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertical maupun horizontal di antara posisi yang telah diserahi tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. (Sumber: Hasibuan, 2009:133)

Jadi, organisasi merupakan suatu hubungan (*relationship*) structural, yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan atas dasar ini semua anggota dikoordinasi.

#### 2.1.3.2 Jenis-Jenis Wewenang (*authority*)

*Line authority* fungsi-fungsi yang mempunyai tanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan perusahaan. *Staff authority* adalah fungsi-fungsi yang tidak menyumbangkan secara langsung pencapaian tujuan perusahaan, tetapi melakukannya secara tidak langsung dengan membantu dan memberikan fasilitas, saran kepada pelaksanaan fungsi lini.

*Apa perbedaan line authority dengan staff authority/*

1. Manajer yang punya *line authority* bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan perusahaan. Mereka berhak menetapkan keputusan dan memerintah untuk merealisasi keputusan-keputusan tersebut. Sedangkan pemegang *staff authority* bertanggung jawab untuk membantu keancaran kegiatan *line authority*. Mereka hanya berhak memberikan saran-saran, dan pelayanan, tetapi tidak berhak mengambil keutusan dan tidak berhak untuk merealisasi tujuan secara langsung.
2. *Line authority* mempunyai kekuasaan untuk memerintah, sedangkan *staff authority* hanya berwenang memberikan saran-saran, nasihat-nasihat, dan informasi.
3. *Line authority* mempunyai kekuasaan untuk bertindak, sedangkan *staff authority* mempunyai wewenang untuk

memikirkan atau berpikir dan menyarankan apa yang dilakukan oleh *line authority*. (Hasibuan 2009:138)

*Functional authority* adalah hak untuk memerintah bagian-bagian yang lain sepanjang mengenai hal-hal yang khusus. Misalnya mengenai prosedur-prosedur, proses, metode-metode kerja, baik yang oleh manajer lini atau pun *staff authority*. Perlu dihayati bahwa hanya wewenang (*authority*) saja yang dapat didelegasikan, sedangkan tanggung jawab (*responsibility*) tidak dapat didelegasikan. Demikian juga wewenang pribadi atau wibawa pribadi (*personal authority*) tidak dapat didelegasikan. *Authority* dan *responsibility* hanya dapat dikuasai oleh unsur manusia saja, sedang unsur manajemen lain tidak dapat memilikinya.

### **2.1.3.3 Asas Pendelegasian Wewenang**

Asas pendelegasian wewenang, dalam pendelegasian wewenang *delegator* perlu memperhatikan beberapa asas, yaitu :

1. Asas kepercayaan.
2. Asas delegasi atas hasil yang diharapkan.
3. Asas penentuan fungsi atau asas kejelasan tugas.
4. Asas rantai berkala.
5. Asas tingkat wewenang.
6. Asas kesatuan komando.
7. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab.
8. Asas pembagian kerja.
9. Asas efisiensi.
10. Asas kemutlakan tanggung jawab (*Principle of absoluteness of responsibility*). Hasibuan (2009:75)

#### **1. Asas kepercayaan**

*Delegator* hanya akan mendelegasikan sebagian wewenang kepada *delegate*, jika *delegate* tersebut dapat dipercaya. Kepercayaan ini harus didasarkan atas pertimbangan yang objektif mengenai kecakapan, kemampuan, kejujuran, keterampilan dan

tanggung jawab dari *delegate* bersangkutan. *Delegator* (pemimpin) yang efektif, jika mampu mendelegasikan wewenang kepada bawahan yang tepat dan dengan pertimbangan yang seobjektif-objektifnya, bukan atas pertimbangan subjektif, kawan, keluarga, dan lain sebagainya.

## 2. Asas Delegasi Atas Hasil yang Diharapkan

Pemimpin (*delegator*) dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan atas hasil (pekerjaan) yang akan dilakukan oleh *delegate*. Tidak boleh kurang ataupun lebih. Asas ini memperhatikan hasil yang akan diperoleh dari pendelegasian wewenang itu. Harus disesuaikan dengan adanya jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pendelegasian wewenang tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi hanya sebesar yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan hasil 10 ton maka delegasikan wewenang untuk memproduksi 10 ton saja.

## 3. Asas Penentuan Fungsi atau Kejelasan Tugas

Asas penentuan tugas (*principle of function definition*) yang dilakukan manajer kepada para bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang harus dilakukan maka akan semakin jelas *delegation of authority* dalam organisasi dan semakin jelas pula hubungan wewenang dengan bagian-bagian lainnya maka akan semakin jelas pula tanggung jawab seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut asas ini pendelegasian wewenang harus didasarkan atas *job description* seseorang bawahan.

## 4. Asas Rantai Berkala

Asas rantai berkala (*principle scalar of chain*), artinya manajer (*delegator*) dalam mendelegasikan wewenang, harus dilakukan menurut urutan-urutan kedudukan dari pada pejabat yakni dari atas kebawah. Misalnya, dari manajer puncak → ke manajer madya → ke manajer lini → ke operasional, sedangkan pertanggung jawaban melalui aliran sebaliknya dari bawah ke atas. Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak sampai pada bawahan. Jika manajer akan memerintahkan tugas kepada bawahan, harus melalui tingkatan-tingkatan yang ada, jadi seperti turun tangga; tidak boleh dilakukan dengan tindakan dumping. Menurut Henry Fayol, semakin jelas garis wewenang dari manajer puncak dalam perusahaan ke setiap bawahan, akan semakin efektif tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan komunikasi.

## 5. Asas Tingkat Wewenang (The Authority Level Principle)

Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dan kebijaksanaan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya.

#### 6. Asas Kesatuan Kkomando (Principle Unity Of Command)

Setiap bawahann harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Tetapi seorang atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan.

#### 7. Asas Keseimbangan Wewenang dan Tanggung Jawab (Parity Of Authority and Responsibility)

Menurut asas ini, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta (*authority = responsibility*)-nya. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan berakibat terjadinya kemandekan tugas-tugas, *overlapping*, dan adanya tindakan-tindakan yang tumpang tindih.

Jadi, manajer (*delegator*) tidak boleh meminta tanggung jawab (hasil) yang lebih besar dari wewenang yang didelegasikan pada bawahan. Misalnya, jika wewenang yang didelegasikan sebesar (X) maka tanggung jawab (*responsibility*)-nya pun harus sebesar (X) pula. Tidak boleh kurang ataupun lebih, harus seimbang.

#### 8. Asas Pembagian Kerja (Division of Work)

Menurut asas ini, untuk berfungsinya organisasi hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan (*delegation of authority*), karena tanpa adanya pembagian kerja, manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan langsung dikerjakan sendiri oleh manajer. Partisipasi bawahan kurang dan mereka tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan, sebab tidak memiliki wewenang.

#### 9. Asas Efisiensi

Menurut asas ini dengan pendelegasian wewenang maka manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting dari pada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahan. Keuntungan spesialisasi dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga manajer dapat memikirkan perkembangan perusahaan.

#### 10. Asas Kemutlakan Tanggung Jawab (Principle of Absoluteness of Responsibility)

Menurut asas ini, bahwa setiap *delegate* yang menerima wewenang, mutlak harus bertanggung jawab kepada *delegator* (atasan)-nya mengenai wewenang (pekerjaan-pekerjaan) yang dilakukannya. Tanggung jawab tidak boleh didelegasikan kepada bawahan yang menerima wewenang itu. Harus wewenang yang boleh didelegasikan kepada bawahan. Tegasnya seseorang yang menerima wewenang tersebut. Perlu diperhatikan bahwa atas berlaku



mutlak, tetapi hanya sebagai pedoman untuk bertindak dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi.

#### **2.1.4 Definisi Pengarahan**

Fungsi pengarahan (*directing = actuating = leading = penggerakan*) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan harga diri, cita-cita, dan lain-lainnya.

Pelaksana pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimana pun canggih atau andalnya, baru dapat dilakukan jika karyawan (manusia) ikut berperan aktif melaksanakannya. Fungsi pengarahan ini adalah ibarat kunci starter mobil, artinya mobil baru dapat berjalan jika kunci staternya telah terlaksanakan fungsinya. Demikian juga proses manajemen, baru terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan. Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan dalam Hasibuan (2009:183) Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan G.R Terry berpendapat bahwa:

*"Actuating is setting all members of the group to want to achieve to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts."*

(Pengarahaan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.)

Jadi pengarahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, pengarahaan ini dapat dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan instruktif, tergantung cara mana yang efektif.

#### **2.1.4.1 Komunikasi**

Komunikasi (*communication*) merupakan hal yang terpenting dalam manajemen. Karena proses manajemen baru terlaksana, jika komunikasi dilakukan. Pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi saja, tnpa komunikasi proses manajemen tidak terlaksana.

Henry Clay Lindegren dalam Hasibuan (2009:190) mengatakan bahwa *effective leadership means effective communication* atau kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang efektif. Sedangkan Drs.H Malayu S.P Hasibuan dalam Hasibuan (2009:191) mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporn, berita, ide, pesan atau informs dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi.

Jadi peran komunikasi dalam proses manajemen sangat menentukan berhasil atau tidaknya seorang manajer mencapai tujuan organisasi, karena hubungan dan interaksi manusia tercipta hanya dengan komunikasi dan komunikasi yang baik jika lengkap, jelas, tepat, benar dan menimbulkan feedback serta interaksi.

#### **2.1.4.2 Kepemimpinan**

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan intisari manajemen. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan karyawan bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu perusahaan akan baik, jika tipe, gaya, cara atau *style* kepemimpinan yang diterapkan manajernya baik.

Tegasnya baik atau buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan suatu perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kecakapan manajer dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengerahkan para bawahannya. Kecakapan dan kewibawaan seorang manajer melakukan kepemimpinannya akan mendorong gairah kerja, kreativitas, partisipasi, dan para bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

### 2.1.4.3. Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa Latin, *Movere* yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi ini mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimilikinya. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.

Motivasi ini hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Bagi orang-orang yang tak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut tidak perlu dimotivasi karena percuma. Memotivasi ini sangat sulit, karena pimpinan sulit untuk mengetahui kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) yang diperlukan bawahan dari hasil pekerjaannya itu.

Orang-orang mau bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan (fisik dan mental), baik itu kebutuhan yang disadari (*conscious needs*) maupun kebutuhan yang tidak disadari (*unconscious needs*) nya. Kebutuhan (*needs*) setiap orang adalah sama, misalnya setiap orang butuh makan dan minum. Tetapi keinginan (*wants*) dari setiap orang tidak sama, karena dipengaruhi oleh selera kebiasaan dan lingkungannya, misalnya Elvin senang minuman yang panas, sedang Fitrawan senang minuman yang dingin. Dalam memotivasi ini pimpinan hanya berdasar perkiraan-perkiraan mengenai kebutuhan dan atau keinginan-keinginan yang dapat merangsang gairah kerja bawahannya. (Hasibuan, 2009:217)

#### **2.1.5. Definisi Pengendalian (*Controlling*)**

Fungsi Pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena :

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. (Hasibuan, 2009:241)

Sementara itu G.R Terry dalam Hasibuan (2009:242) berpendapat bahwa:

*“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.”*

(Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar)

Tujuan pengendalian :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. (Hasibuan, 2009:242)

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah poses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen (6M), efektif dan efisien.

#### **2.1.5.2. Asas-Asas Pengendalian**

Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel dalam Hasibuan (2009:243), mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu ;

1. Asas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective*), artinya pengendalian harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

2. Asas efisiensi pengendalian (*Principle of control responsibility*), artinya pengendalian itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab pengendalian (*Principle of control responsibility*), artinya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Asas pengendalian terhadap masa depan (*Principle of future control*). Artinya pengendalian yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Asas pengendalian langsung (*Principle of direct control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh manajer, atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
6. Asas refleksi rencana (*Principle of reflection plans*), artinya pengendalian harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle of reflection organization suitability*), artinya pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengendalian yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
8. Asas pengendalian individual (*Principle Of individual of control*), artinya pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.

#### **2.1.6. Pengertian Sampah**

Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007). Banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali/ pendaaurulangan (re-using),

walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan/ material yang tidak dapat digunakan kembali (Dainur, 1995).

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya).

#### **2.1.6.1. Jenis Sampah**

Pada prinsipnya sampah dibagi menjadi sampah padat, sampah cair dan sampah dalam bentuk gas (fume, smoke). Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya
  - a. Sampah anorganik misalnya : logam-logam, pecahan gelas, dan plastik
  - b. Sampah Organik misalnya : sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya
2. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar
  - a. Mudah terbakar misalnya : kertas, plastik, kain, kayu
  - b. Tidak mudah terbakar misalnya : kaleng, besi, gelas
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk
  - a. Mudah membusuk misalnya : sisa makanan, potongan daging



b. Sukar membusuk misalnya : plastik, kaleng, kaca (Dainur, 1995)

#### 2.1.6.2. Karakteristik Sampah

1. *Garbage* yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air bebas.
2. *Rubbish* terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-kantor, tapi yang tidak termasuk *garbage*.
3. *Ashes* (Abu) yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik dirumah, dikantor, industri.
4. "*Street Sweeping*" (Sampah Jalanan) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, daun-daunan.
5. "*Dead Animal*" (Bangkai Binatang) yaitu bangkai-bangkai yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.
6. *Household Refuse* yaitu sampah yang terdiri dari *rubbish*, *garbage*, *ashes*, yang berasal dari perumahan.
7. *Abandoned Vehicles* (Bangkai Kendaraan) yaitu bangkai- bangkai mobil, truk, kereta api.
8. Sampah Industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri-industri, pengolahan hasil bumi.
9. *Demolition Wastes* yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung.
10. *Construction Wastes* yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan, perbaikan dan pembaharuan gedung-gedung.
11. *Sewage Solid* terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan.
12. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng-kaleng cat, zat radiaktif. (Mukono, 2006)

### 2.1.7. Sumber-Sumber Sampah

Sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut :

#### 1. Pemukiman penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), perabotan rumah tangga, abu atau sisa tumbuhan kebun. (Dainur, 1995)

#### 2. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

#### 3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, antara lain, tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai empat berlibur, dan sarana pemerintah lain. Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

#### 4. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam dan tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

#### 5. Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman dan binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman (Chandra, 2007).

### **2.1.8. Pengelolaan Sampah Padat**

Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, diantaranya:

#### 1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber

Sampah yang ada di lokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya. Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut berikut ini:

- a. Konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor

- b. Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan
- c. Ukuran sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang.

Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah sampah). Dipo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga. Pengelolaannya dapat diserahkan pada pihak pemerintah. Untuk membangun suatu dipo, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah.
2. Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu untuk mengambil sampah.
3. Memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam dipo.
4. Ada kran air untuk membersihkan
5. Tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat atau tikus.
6. Mudah dijangkau masyarakat  
Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua metode :
  - a. Sistem duet : tempat sampah kering dan tempat sampah basah
  - b. Sistem trio : tempat sampah basah, sampah kering dan tidak mudah terbakar.

## 2. Tahap pengangkutan

Dari dipo sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota (Chandra, 2007) .

## 3. Tahap pemusnahan

Di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain :

#### **a. Sanitary Landfill**

*Sanitary landfill* adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat. *Sanitary landfill* yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu tersedia tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, tersedia alat-alat besar. Semua jenis sampah diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi pemukiman. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menerapkan teknik *sanitary landfill* ini, yaitu:

##### 1. Metode galian parit (*trench method*)

Sampah dibuang ke dalam galian parit yang memanjang. Tanah bekas galian digunakan untuk menutup parit tersebut. Sampah yang ditimbun dan tanah penutup dipadatkan dan diratakan kembali. Setelah satu parit terisi penuh, dibuat parit baru di sebelah parit terdahulu.

##### 2. Metode area

Sampah yang dibuang di atas tanah seperti pada tanah rendah, rawa-rawa, atau pada lereng bukit kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang diperoleh dari tempat tersebut.

##### 3. Metode *ramp*

Metode *ramp* merupakan teknik gabungan dari kedua metode di atas. Prinsipnya adalah bahwa penaburan lapisan tanah dilakukan setiap hari dengan tebal lapisan sekitar 15 cm di atas tumpukan sampah.

Setelah lokasi *sanitary landfill* yang terdahulu stabil, lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana jalur hijau (pertamanan), lapangan olahraga, tempat rekreasi, tempat parkir, dan sebagainya (Kusnoputranto, 1986)

#### **b. Incineration**

*Incineration* atau insinerasi merupakan suatu metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik. Manfaat sistem ini, antara lain :

1. Volume sampah dapat diperkecil sampai sepertiganya.
2. Tidak memerlukan ruang yang luas.
3. Panas yang dihasilkan dapat dipakai sebagai sumber uap.

4. Pengelolaan dapat dilakukan secara terpusat dengan jadwal jam kerja yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan metode ini : biaya besar, lokalisasi pembuangan pabrik sukar didapat karena keberatan penduduk. Peralatan yang digunakan dalam insenerasi, antara lain :

1. *Charging apparatus*

*Charging apparatus* adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari kendaraan pengangkut sampah. Di tempat ini sampah yang terkumpul ditumpuk dan diaduk.

2. *Furnace*

*Furnace* atau tungku merupakan alat pembakar yang dilengkapi dengan jeruji besi yang berguna untuk mengatur jumlah masuk sampah dan untuk memisahkan abu dengan sampah yang belum terbakar. Dengan demikian tungku tidak terlalu penuh.

3. *Combustion*

*Combustion* atau tungku pembakar kedua, memiliki nyala api yang lebih panas dan berfungsi untuk membakar benda-benda yang tidak terbakar pada tungku pertama.

4. *Chimney* atau *stalk*

*Chimney* atau *stalk* adalah cerobong asap untuk mengalirkan asap keluar dan mengalirkan udara ke dalam

5. *Miscellaneous features*

*Miscellaneous features* adalah tempat penampungan sementara dari debu yang terbentuk, yang kemudian diambil dan dibuang (Chandra, 2007).

### c. *Composting*

Pemusnahan sampah dengan cara proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk hijau (Dainur, 1995). Berikut tahap-tahap di dalam pembuatan kompos:

1. Pemisahan benda-benda yang tidak dipakai sebagai pupuk seperti gelas, kaleng, besi dan sebagainya.
2. Penghancuran sampah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil (minimal berukuran 5 cm)
3. Penyampuran sampah dengan memperhatikan kadar karbon dan nitrogen yang paling baik (C:N=1:30)

4. Penempatan sampah dalam galian tanah yang tidak begitu dalam. Sampah dibiarkan terbuka agar terjadi proses aerobik.
5. Pembolak-balikan sampah 4-5 kali selama 15-21 hari agar pupuk dapat terbentuk dengan baik.

**d. Hog Feeding**

Pemberian sejenis *garbage* kepada hewan ternak (misalnya: babi). Perlu diingat bahwa sampah basah harus diolah lebih dahulu (dimasak atau direbus) untuk mencegah penularan penyakit cacing dan trichinosis.

**e. Discharge to sewers**

Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem pembuangan air limbah memang baik.

**f. Dumping**

Sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah lapangan, jurang atau tempat sampah.

**g. Dumping in water**

Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya, terjadi pencemaran pada air dan pendangkalan yang dapat menimbulkan bahaya banjir. (Mukono, 2006)

**h. Individual Incineration**

Pembakaran sampah secara perorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama di daerah pedesaan.

**i. Recycling**

Pengolahan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat dipakai atau di daur ulang. Contoh bagian sampah yang dapat di daur ulang, antara lain plastik, kaleng, gelas, besi, dan sebagainya.

**j. Reduction**

Metode ini digunakan dengan cara menghancurkan sampah (biasanya dari jenis *garbage*) sampai ke bentuk yang lebih kecil, kemudian di olah untuk menghasilkan lemak.

**k. Salvaging**

Pemanfaatan sampah yang dipakai kembali misalnya kertas bekas. Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit (Chandra, 2007).

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Salah satu persoalan yang dihadapi manusia di kota-kota besar adalah masalah sampah. Pencemaran timbul disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas/kegiatan manusia yang beraneka ragam. Sejalan dengan perkembangan kota, volume sampah inipun meningkat secara drastis dan jenis sampahnya semakin beraneka ragam. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Setiap manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Terutama produksi sampah-sampah rumah tangga yang cenderung sulit diuraikan. Seperti yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang sudah empat tahun memisahkan diri dengan Kabupaten Tangerang. Pada saat ini penanganan permasalahan sampah di wilayah kota Tangerang Selatan belum bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung kebersihan. Masyarakat kota Tangerang Selatan juga masih mengeluhkan pelayanan sampah yang kurang memuaskan karena masih ada beberapa titik sampah yang belum terangkut dengan baik serta belum berfungsinya TPA Cipeucang sampai saat ini, TPA yang dijadwalkan akan berfungsi tahun 2012 ini ternyata jauh dari perkiraan, karena sampai saat ini saja tahap revitalisasi TPA tersebut belum sepenuhnya rampung

Berdasarkan masalah yang diperoleh dari observasi awal serta landasan teori yang dibahas sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu



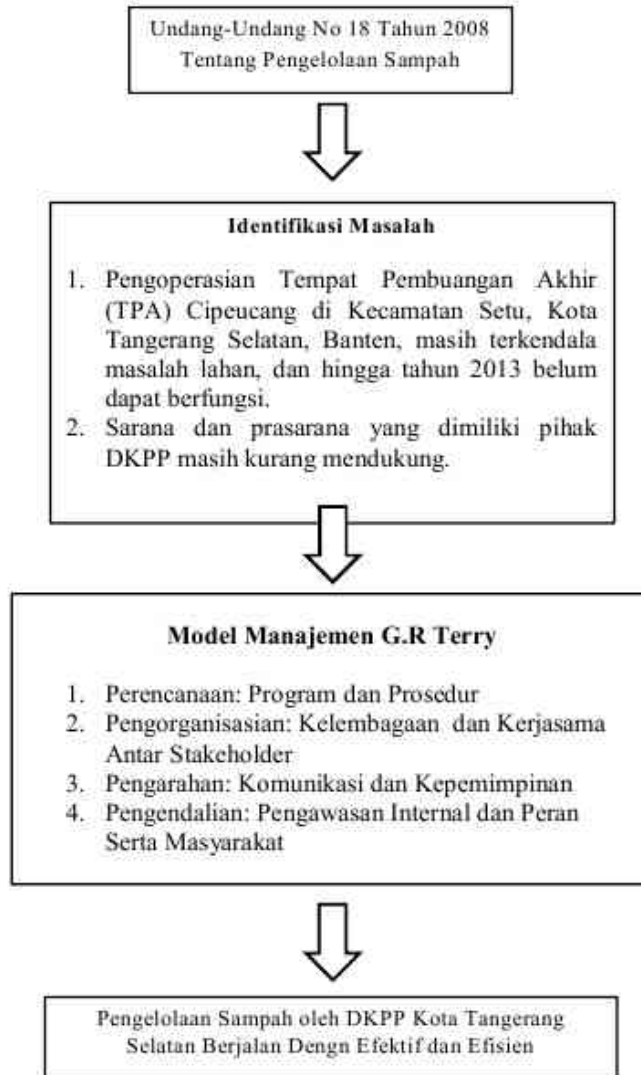
menggunakan teori manajemen untuk mengetahui bagaimana peran serta upaya Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan khususnya permasalahan sampah di TPA Cipeucang dengan menggunakan teori manajemen yang diungkapkan oleh G.R Terry. Adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu manajemen pengelolaan, antara lain:

1. Perencanaan, indikator yang akan dinilai dalam proses perencanaan ini adalah program dan prosedur
2. Pengorganisasian, indikator yang akan dinilai dalam proses pengorganisasian ini adalah kelembagaan dan kerjasama antar stakeholder
3. Pengarahan, indikator yang akan dinilai dalam proses pengarahan ini adalah komunikasi dan kepemimpinan
4. Pengendalian, indikator yang akan dinilai dalam proses pengendalian ini adalah pengendalia internal dan peran serta masyarakat

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini: (lihat gambar 2.1)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Undang-Undang No 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah



**Identifikasi Masalah**

1. Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, masih terkendala masalah lahan, dan hingga tahun 2013 belum dapat berfungsi.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki pihak DKPP masih kurang mendukung.



**Model Manajemen G.R Terry**

1. Perencanaan: Program dan Prosedur
2. Pengorganisasian: Kelembagaan dan Kerjasama Antar Stakeholder
3. Pengarahan: Komunikasi dan Kepemimpinan
4. Pengendalian: Pengawasan Internal dan Peran Serta Masyarakat



Pengelolaan Sampah oleh DKPP Kota Tangerang  
Selatan Berjalan Dengan Efektif dan Efisien

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci (Riduwan, 2005 : 51), sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian eksploratif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian eksploratif kualitatif.

Penelitian eksploratif kualitatif ini berusaha untuk mencari atau menggali informasi mengenai permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai implemementasi kebijakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dalam Pengelolaan TPA Cipeucang Kota Tangsel.

### 3.2 Instrumen Penelitian

Pada metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama. Menurut Nasution (Prastowo, 2011:43) peneliti adalah *key instrument* atau alat penelitian utama. Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan informan. Walaupun menggunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian.

### 3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Prastowo, 2011:199). Situasi tersebut terdapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang disudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau suatu wilayah negara. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan (Sugiono, 2008:49-50).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, yang sumber informasinya diperoleh dari staff TPA, kepala UPTD, kepala bidang kebersihan, sekretaris bidang kebersihan, kasie bidang kebersihan, masyarakat sekitar, dan pemulung yang berupa wawancara maupun pengamatan terfokus (*observasi*).
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari informasi media yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan layak dijadikan sebagai referensi, dokumentasi dalam melakukan penelitian.

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu kantor Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dan TPA Cipeucang.
- b. Studi Kepustakaan, menurut Singarimbun (1989:70) adalah pemanfaatan bahan-bahan referensi sebagai rujukan teori dan asumsi yang berkaitan serta menunjang penelitian. Studi kepustakaan ini meliputi data-data yang didapat dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data-data yang diperoleh seperti profil DKPP, Perda dan lain-lain.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Pengamatan/Observasi**

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat secara langsung dengan menggunakan indera mata tanpa menggunakan pertolongan alat. Disini peneliti akan melakukan pengamatan bagaimana tindakan Dinas Kebersihan Kota Tangerang Selatan menyikapi belum berfungsinya TPA Cipeucang sebagaimana mestinya.

Menurut Hadi (dalam Prastowo, 2011:22) pengamatan (observasi) diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan

melalui cara berperanserta (partisipan) dan yang tidak berperanserta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2006:176).

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pekerjaan DKPP dalam menangani permasalahan sampah serta tidak terlibat dalam aktivitas sebagai pemulung. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi TPA Cipeucang, pemulung, masyarakat dan upaya Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman (DKKP) dalam menangani masalah yang terjadi.

#### **3.4.2 Wawancara**

Pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2011:212). Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah teknik wawancara mendalam. Adapun wawancara mendalam ini secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Prastowo, 2011:212).

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapih dan terlebih dulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
2. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
3. Menentukan strategi dan taktik berwawancara
4. Mempersiapkan pencatatan data wawancara.

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pemendekan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 1985:234-242). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, tetapi tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian peneliti. Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Proses penyusunannya disesuaikan pada indikator manajemen pengelolaan dengan menggunakan teori G.R Terry yang dimensinya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi berdasarkan fokus penelitian peneliti yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pedoman Wawancara**

No	Dimensi	Sub Dimensi	Informan
1	<i>Planning /</i> Perencanaan	a) Program b) Prosedur	I <sub>1-1</sub> I <sub>1-2</sub> I <sub>1-3</sub> I <sub>1-4</sub> I <sub>1-5</sub> I <sub>5-2</sub>
2	<i>Organizing /</i> Pengorganisasian	a) Kelembagaan b) Kerjasama Antar Stakeholder	I <sub>1-1</sub> I <sub>1-3</sub> I <sub>1-5</sub>
3	<i>Actuating /</i> Pengarahan	a) Komunikasi b) Kepemimpinan	I <sub>1-2</sub> I <sub>1-4</sub> I <sub>1-5</sub> I <sub>1-6</sub> I <sub>3-1</sub> I <sub>3-2</sub> I <sub>3-3</sub>
4	<i>Controlling /</i> Pengendalian	a) Pengendalian Internal b) Peran Serta masyarakat	I <sub>1-4</sub> I <sub>1-5</sub> I <sub>2-1</sub> I <sub>2-2</sub> I <sub>4-1</sub> I <sub>4-2</sub>



			I <sub>5-1</sub>
			I <sub>6-1</sub>

(Sumber, Peneliti 2012)

### 3.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi didapat dari dokumen resmi pemerintah. Dimana peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi atau *library research*. Prinsip teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengenali data dokumenter yang telah tersedia dalam perpustakaan. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Menurut Arikunto (Damandiri, 2010)

### 3.5. Penentuan Informan

Narasumber atau Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2006: 132). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono (Prastowo, 2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut.

Didalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Untuk itu peneliti secara individu akan turun ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Pengambilan sumber data

penelitian ini menggunakan teknik "*purposive*" yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang menguasai fokus penelitian. Di sini peneliti memilih informan pegawai di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), tenaga kerja angkutan sampah, masyarakat dan pemulung sekitar TPA Cipeucang. Adapun tabel instrumennya sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Daftar Informan**

No	Informan	Kode informan
1	Pegawai Bidang kebersihan	I <sub>1</sub>
2	Tenaga Kerja Renovasi TPA Cipeucang	I <sub>2</sub>
3	Tenaga Kerja Pengangkut Sampah	I <sub>3</sub>
4	Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa	I <sub>4</sub>
5	Masyarakat	I <sub>5</sub>
6	Pemulung	I <sub>6</sub>

(Sumber, Peneliti 2012)

Daftar informan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan objek penelitian yang mengetahui persis dan berkompeten dalam hal yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, data dan informasi yang peneliti peroleh dalam proses wawancara ataupun observasi dapat dipastikan ke validannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun daftar informan diatas hanya bersifat sementara, artinya tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan wawancara dengan informan lain yang juga paham dengan fokus penelitian yang peneliti bahas pada saat penelitian berlangsung. Artinya

penentuan informan lainnya yaitu menggunakan teknik *snowball*. Hal ini dilakukan karena dari jumlah tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan

### **3.6. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis selama dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses datanya mencakup :

#### **3.6.1. Data *Reduction* (Reduksi data)**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

### **3.6.2. Data Display (Penyajian Data)**

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo, 2011:244). Dengan melihat penyajian-penyajian, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

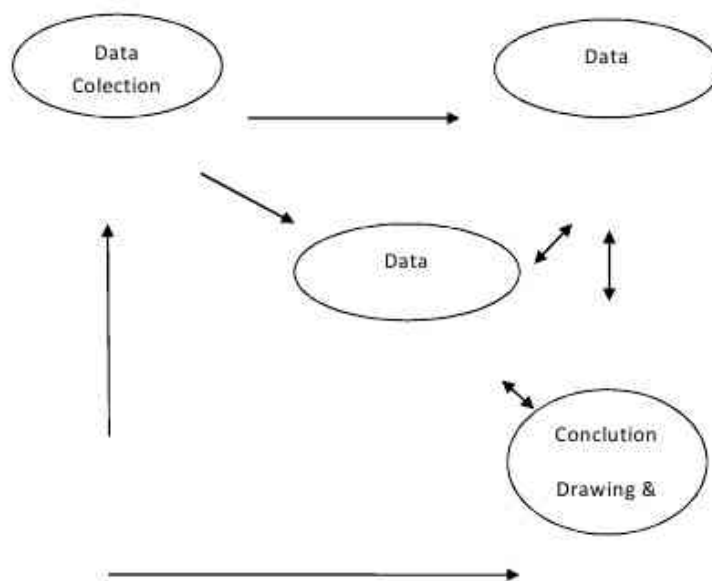
### **3.6.3. Conclusion Drawing /verification (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011:250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan

rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

**Gambar 3.1**

**Siklus Teknis Analisi Data Menurut Miles dan Huberman**



( Sumber : Bungin, 2005:69 )

**3.7. Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti (Prastowo, 2011:266). Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member check*, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011:265). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi dan *member check*.

### 3.7.1. Triangulasi

Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Denzin (Prastowo, 2011:269) membedakan teknik ini menjadi lima macam yaitu :

- 1) Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
- 4) Triangulasi penyidik yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
- 5) Triangulasi teori yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju. Moleong (2005: 330-331) menjelaskan bahwa triangulasi dengan sumber menurut Patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dilapangan melalui beberapa sumber dengan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan

triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber sendiri dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika berdasarkan kedua teknik tersebut menghasilkan temuan yang berbeda-beda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

### **3.7.2. Member Check**

*Member Check* adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Prastowo, 2011: 272). Jika data yang kita temukan itu disepakati oleh para pemberi

data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel (dapat dipercaya). Namun sebaliknya, jika pemberi data tidak menyepakatinya, kita harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pada penelitian ini, *member check* dilakukan dengan cara peneliti mencatat temuan lapangan yang diperoleh saat penelitian berlangsung, kemudian meminta informan tersebut untuk memeriksa kembali apa yang sudah peneliti catat agar dapat disepakati untuk dipublikasikan. Setelah disepakati, peneliti meminta kepada informan tersebut untuk menandatangani hasil catatan lapangan supaya lebih autentik. Langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.

### **3.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, tepatnya di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Ada beberapa alasan yang diasumsikan peneliti sangat kompleks untuk mengangkat persoalan tentang Implementasi Kebijakan Dinas Kebersihan dalam Pengelolaan TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan karena di TPA tersebut pengelolaan sampahnya belum sesuai berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih enam (8) bulan. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober dan berakhir hingga bulan Mei berdasarkan atas tabel berikut ini:



**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																				
		Tahun 2011-2013																				
		O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u s	S e p	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r			
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Proses bimbingan proposal	■	■	■																		
3	Observasi Awal				■	■																
4	Penyusunan proposal					■	■	■														
5	Seminar proposal								■													
6	Revisi proposal									■	■	■										
7	Penyusunan Bab IV-V											■	■	■	■	■	■	■				
8	Bimbingan dan revisi Bab IV-V																		■	■		
9	Sidang skripsi																				■	■
10	Revisi skripsi																					■
11	Penyerahan skripsi																					■

(Sumber : Peneliti, 2012)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan terletak dibagian timur Provinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh Sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa, dengan luas wilayah 147,19 km<sup>2</sup>. Menurut Kabupaten Tangerang dalam angka tahun 2007/2008, luas wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan (yang kemudian diambil sebagai luas wilayah kota Tangerang Selatan), adalah sebesar 150,78 km<sup>2</sup>, sedangkan menurut kompilasi data untuk penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan, adalah sebesar 147,19 km<sup>2</sup>, dengan rincian luas kecamatan masing-masing yang berbeda pula. Angka yang digunakan adalah 147,19 km<sup>2</sup>, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

**Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan dan Desa Per Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Serpong	9		69	337
2	Serpong utara	7		65	272
3	Ciputat	7		92	460
4	Ciputat Timur	6		75	416
5	Pamulang	8		129	690
6	Pondok Aren	11		113	677
7	Setu	1	5	29	144
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>572</b>	<b>2996</b>

Sumber: DKPP Kota Tangerang Selatan 2012

Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06.

Keadaan iklim didasarkan pada penelitian di stasiun geofisika klas I Tangerang, yaitu berupa tempratur (suhu) udara, kelembapan udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berkisar antara (23,5 – 32,6)<sup>o</sup>C, temperature maksimum tertinggi pada bulan oktober yaitu 33,9<sup>o</sup>C dan temperatur terendah pada bulan agustus dan September yaitu 22,8<sup>o</sup>C. Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu seluas 9.941,41 Ha atau 67,54% dari 14.718 Ha. Sawah ladang dan kebun menempati posisi kedua terluas dengan 2.794,41 Ha atau 18,99%. Penggunaan lahan paling kecil adalah untuk pasir dan galian yaitu seluas 15,27 Ha atau 0,1%.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur terpenting sebagai salah satu faktor daya tarik investasi di suatu daerah. Jalan Kota Tangerang Selatan

berdasarkan kompilasi data untuk penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) memiliki total panjang 115,81 km, dengan 70,36% dari panjang tol tersebut dalam kondisi baik, 18,37% dalam kondisi sedang dan 11,28% dalam kondisi rusak.

Terkait dengan pengelolaan limbah, baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair, terdapat 21 tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebagian besarnya menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah TPS liar. Selain itu juga terdapat 5 unit *water treatment plant* (WTP) yang tersebar di serpong, serpong utara dan pondok aren.

**Tabel 4.2 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Water Treatment Plant (WTP) Di Kota Tangerang Selatan**

No.	Lokasi	TPS	WTP
1	Serpong	1	3
2	Serpong Utara	3	1
3	Ciputat	3	0
4	Ciputat Timur	1	0
5	Pamulang	3	0
6	Pondok Aren	3	1
7	Setu	3	0
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>5</b>

Sumber: DKPP Kota Tangerang Selatan 2012

Bencana banjir merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk yang bahkan di lokasi tertentu harus dihadapi secara rutin. Lokasi rawan banjir terdapat di sepanjang beberapa sungai yang mengalir di Kota Tangerang Selatan, di

antaranya Kali Angke, Kali Serua, Kali Pasanggrahan, Kali Ciputat dan Kali Kedaung.

Di Kota Tangerang Selatan terdapat 9 situ, yang tersebar di 5 kecamatan. Situ-situ tersebut adalah Situ pondok jagung / Rawa Kutup, Situ Parigi, Situ Bungur, Situ Antak, Situ Rompang, Situ Gintung, Situ Legoso, Situ Pamulang / Pondok Benda dan Situ Ciledug / kedaung. Namun, ada 4 situ yang sudah tidak tertera pada peta, yaitu Situ Bungur, Situ Antak, Situ Rompang dan Situ Legoso. Situ Gintung saat ini tidak berfungsi akibat jebolnya pada akhir Maret 2009.

#### **4.1.2. Gambaran Umum Dinas kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman**

##### **(DKPP) Kota Tangerang Selatan**

###### **4.1.2.1. Visi dan Misi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, bagaimana dan kemana organisasi harus dibawa agar konsisten dan tetap berjalan secara inovatif dan produktif. Dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan menetapkan visi yaitu:

**” Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang bersih, hijau, gemerlap dan teratur”**

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan menjabarkannya ke dalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan

sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Berfungsinya TPA sampah Cipeucang
- b. Tercukupinya armada pengangkutan yang handal
- c. Terbangunnya TPST dan TPS skala lingkungan
- d. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat tentang penanganan sampah
- e. Tersusunnya rencana induk dan PERDA penanganan sampah
- f. Penataan RTH dan reklame
- g. PJU semua terang dan terang untuk semua
- h. Pembangunan TPU yang representative

#### **4.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### **A. Tugas**

- a. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Bidang kebersihan mempunyai tugas perencanaan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program kebersihan
- c. Bidang Reklame Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian Reklame dan Pertamanan
- d. Bidang Pemakaman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pemakaman
- e. Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program penerangan jalan umum

## **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kebersihan dan pengelolaan sampah serta tinja, pertamanan dan pemeliharaan RTH, penerangan jalan umum serta pengaturan reklame dan penerangan jalan umum
- b. Perencanaan kebijakan bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pengelolaan penerangan jalan umum
- c. Pelaksanaan penanganan sampah dan tinja yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan atau pengolahan serta pemanfaatannya, pengelolaan TPU dan pengelolaan PJU
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional kebersihan, penanganan sampah dan tinja, pertamanan dan RTH, pemakaman dan PJU.
- e. Pengerahan potensi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan taman yang bersih
- f. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan kebersihan, penghijauan jalan, taman dan lingkungan permukiman, pengelolaan pemakaman dan pengelolaan PJU
- g. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dinas.

### **4.1.2.3. Struktur Organisasi Dinas kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan**

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan adalah pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 tahun 2009

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, susunan organisasi dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Kebersihan:
  1. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah dan Tinja
  2. Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan
- d. Bidang Reklame dan Pertamanan
  1. Seksi Pertamanan
  2. Seksi reklame
  3. Seksi Sarana Prasarana Reklame dan Pertamanan
- e. Bidang Pemakaman
  1. Seksi Penataan
  2. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum
  1. Seksi Pendataan dan Penerangan Jalan Umum
  2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

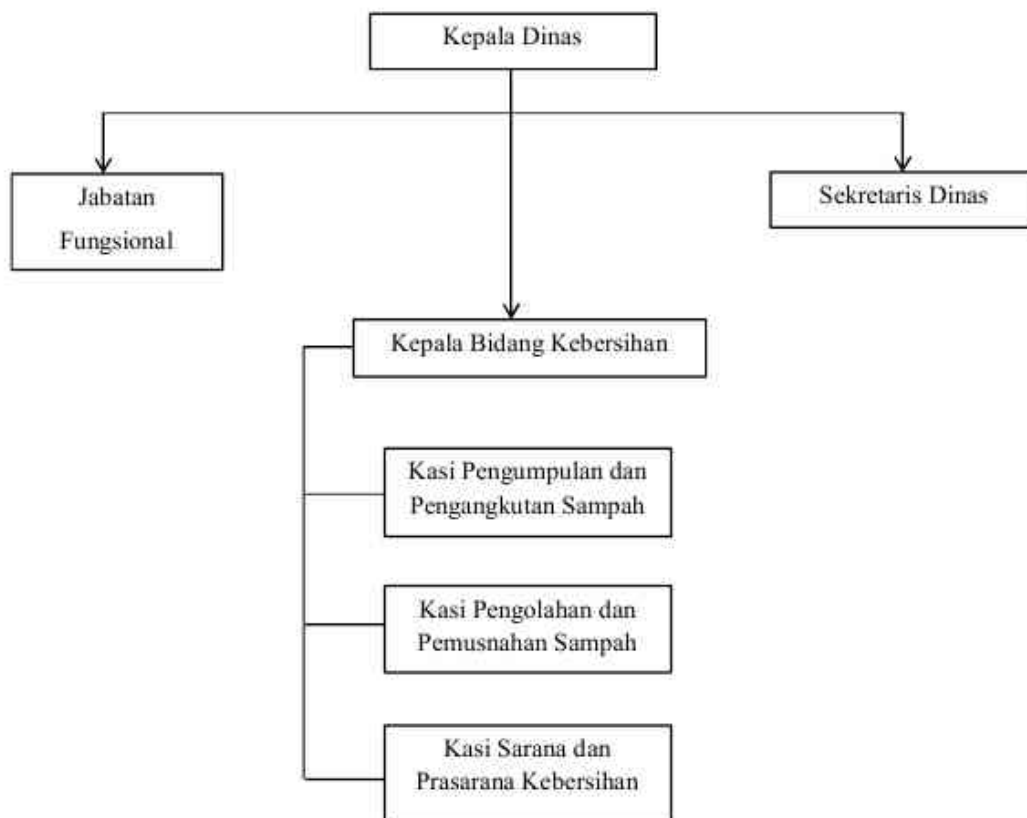
Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada salah satu bidang yang ada di DKPP Kota Tangerang Selatan. Adapun bidang yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu bidang kebersihan.

#### **4.1.2.4 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian Bidang Kebersihan**

Struktur organisasi yang dimiliki bidang kebersihan pada DKPP Kota Tangerang Selatan dibuat dengan acuan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dibawah ini:



**Gambar 4.1 Struktur organisasi Bidang Kebersihan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan**



(Sumber, DKPP 2012)

Mengenai kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) hingga saat ini masih terbatas, jumlah pegawai saat ini tercatat sebanyak 292 orang terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Harian (PH)
3. Pegawai Kontrak Kerja (PKK)

Adapun susunan pegawai Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Susunan Pegawai Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan**

No	Jabatan	Status Pegawai			Jumlah	Ket
		PNS	PH	KK		
1	Kepala Dinas	1			1	
2	Sekretaris dinas	1			1	
3	Kabid	4			4	
4	Kassubag + Kasi	15			15	
5	Staff Dinas	21			21	
6	Pengemudi Kebersihan			18	18	
7	Kenek Pengemudi kebersihan			18	18	
8	Pengemudi Pertamanan			1	1	
9	Pengemudi PJU			1	1	
10	Operator Loader			2	2	
11	Petugas Pemeliharaan Taman		5	34	39	
12	Petugas Pemangkas Pohon					
13	Petugas Pengawas Pemakaman			14	14	
14	Petugas Penjaga Makam			23	23	
15	Pesapon			80	80	
16	Staff Bidang Kebersihan			54	54	
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>245</b>	<b>292</b>	

(Sumber: DKPP, 2012)

#### 4.1.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan

Kedudukan bidang kebersihan merupakan unsur pelaksana dalam hal kebersihan Kota Tangerang Selatan. Bidang kebersihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun bidang kebersihan itu sendiri berdasarkan peraturan Walikota Tangerang Selatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program kebersihan dalam melaksanakan tugas bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan data bahan program sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan penggunaan sampah, perumusan sarana prasarana kebersihan, kebersihan jalan dan penertiban sampah dan lokasi TPS, TPA
- b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang kebersihan
- c. Pelaksanaan pengumpulan data program sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan penggunaan sampah, perumusan sarana prasarana kebersihan, kebersihan jalan dan penertiban sampah dan lokasi TPS, TPA
- d. Pelaksanaan program sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan penggunaan sampah, perumusan sarana prasarana kebersihan, kebersihan jalan dan penertiban sampah dan lokasi TPS, TPA
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan penggunaan sampah. Perumusan sarana prasarana kebersihan, kebersihan jalan dan penertiban sampah, lokasi TPS, TPA
- f. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan operasional sarana prasarana kebersihan
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program
- h. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukum disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarka pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri dari:

#### **A. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah**

Seksi pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan pengumpulan dan pengangkutan sampah, dalam hal melaksanakan tugas pokoknya, seksi pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan dan bahan perumusan lokasi pengumpulan, tenaga-tenaga sebagai pengumpul sampah dan menempatkan di pos-pos pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pengelolaan retribusi sampah.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data lokasi pengumpulan, tenaga-tenaga sebagai pengumpul sampah dan menempatkan di pos-pos pengumpuln, pengangkutan, pembuangan, pengelolaan retribusi sampah
- c. Pelaksanaan kegiatan lokasi pengumpulan tenaga-tenaga sebagai pengumpul sampah dan menempatkan di pos-pos pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pengelolaan retribusi sampah
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan isntansi/lembaga lainnya terkait lokasi pengumpulan tenaga-tenaga sebagai pengumpul sampah dan menempatkan di pos-pos pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pengelolaan retribusi sampah
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **B. Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah**

Seksi pengolahan dan pemusnahan sampah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan dan pemusnahan sampah. Seksi pengolahan dan pemusnahan sampah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan perumusan petunjuk teknis tempat-tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah, pengolahan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kegiatan pengolahan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah
- c. Pelaksanaan kegiatan pengolahan pemusnahan dan pemanfaatan sampah
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan pengolahan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan**

Seksi sarana dan prasarana kebersihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan, perawatan dan operasional sarana dan prasarana kebersihan. Seksi sarana dan prasarana kebersihan memiliki fungsi:

- a. Perencanaan perumusan petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan operasionalnya sarana dan prasarana kebersihan
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, pengadaan, pemeliharaan dan operasionalnya sarana dan prasarana kebersihan
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengadaan, pemeliharaan dan operasionalnya sarana dan prasarana kebersihan
- d. Pemeliharaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidanh tugasnya.

#### **4.1.3 Gambaran Umum TPA Cipeucang**

TPA Cipeucang yang terletak di kampung Cipeucang, Desa Kademangan Kecamatan Setu Provinsi Banten, yang dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2000 memiliki luas lahan sekitar 2,5 hektar dan berbatasan dengan:

- a. Utara : Pasar Serpong
- b. Timur : Kampung Kademangan
- c. Barat : Sungai Cisadane
- d. Selatan : Kecamatan Pamulang

TPA Cipeucang ini hanya melayani masalah sampah khusus untuk daerah Kota Tangerang Selatan saja, namun pada saat ini kondisi TPA tersebut sedang dalam tahap renovasi, semenjak tahun lalu bekerjasama dengan pihak swasta dengan durasi kontrak awal 6-12 bulan, karena TPA Cipeucang ini sudah tidak beroperasi semenjak 5 sampai 6 tahun yang lalu, setelah Kota Tangerang Selatan melakukan pemekaran wilayah, barula TPA ini kembali difungsikan menjadi TPA untuk menampung sampah-sampah (organik-non organik) di wilayah Kota Tangerang Selatan.

#### **4.2 Informan Penelitian**

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab 3 sebelumnya, bahwa penelitian ini informan penelitiannya ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu suatu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti yang memahami objek dan fokus penelitian. Oleh karena itu sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang akan dijadikan informan utama antara lain pegawai bidang kebersihan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan dan tenaga kerja yg sedang merenovasi TPA Cipeucang, masyarakat, pemulung, aparatur pemerintah kecamatan dan desa serta tenaga kerja pengangkut sampah. Pada penelitian ini,

peneliti berhasil melakukan wawancara dengan 20 informan. Adapun inorman-informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Daftar Informan**

No	Kode Informan	Nama Informan	Status Informan
1	I <sub>1</sub>	H. Abdul Aziz, ST, MT (I <sub>1,1</sub> )	Sekretaris Dinas
		H. Oki Rudianto, S.IP, M.Si (I <sub>1,2</sub> )	Kepala Bidang kebersihan
		Dinar Dini Rahayu, S.STP (I <sub>1,3</sub> )	Kep. Sub Bag Umum dan kepegawaian
		Mohammad Ihlas, S.STP (I <sub>1,4</sub> )	Kasi Pengumpulan san pengangkutan Sampah
		Ir. Deden Supriyatna, MM (I <sub>1,5</sub> )	Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah
		Bahrudin, ST (I <sub>1,6</sub> )	Kasi Sarana dan Prasarana Kebersihan
2	I <sub>2</sub>	Ir. Widodo (I <sub>2,1</sub> )	Kepala Renovasi TPA Cipeucang
		Tugiyono, ST (I <sub>2,2</sub> )	Pengawas Renovasi TPA Cipeucang
		Jamal (I <sub>2,3</sub> )	Pekerja Renovasi TPA Cipeucang
		Aceng (I <sub>2,4</sub> )	Pekerja Renovasi TPA Cipeucang
3	I <sub>3</sub>	Didit (I <sub>3,1</sub> )	Pengemudi Truk Pengangkut Sampah
		Agus Sunarya (I <sub>3,2</sub> )	Pengemudi Truk Pengangkut Sampah
		Fitrah (I <sub>3,3</sub> )	Kenek Pengemudi Truk Sampah
4	I <sub>4</sub>	Muktar Lubis, S.IP, M.Si (I <sub>4,1</sub> )	Kepala Kec.Setu
		Felix Maulana S.Sos (I <sub>4,2</sub> )	Kepala Desa Kademangan
5	I <sub>5</sub>	Taryana (I <sub>5,1</sub> )	Warga Desa Cipeucang
		Sobirin (I <sub>5,2</sub> )	Warga Perumahan Serpong
6	I <sub>6</sub>	Kasman (I <sub>6,1</sub> )	Pemulung TPA Cipeucang
		Marsinah (I <sub>6,2</sub> )	Pemulung TPA Cipeucang
		Yakub (I <sub>6,3</sub> )	Pemulung TPA Cipeucang

(Sumber: Peneliti 2012)

#### **4.3. Deskripsi Data**

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah di dapatkan dari hasil observasi penelitian. Dalam penelitian ini mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menggunakan teori Manajemen oleh G.R Terry. Teori tersebut memberikan gambaran atas Manajemen pengelolaan yang terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung, dimana data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan dengan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan. Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisa sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman baru dari data yang di dapatkan.

Beberapa bentuk data seperti dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan baik dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman bagian pengolahan dan pemusnahan sampah yang merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto



kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak DKPP.

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian investigasi sehingga data yang didapatkan harus dikonfirmasi ulang tidak hanya dari satu sumber data atau informan tetapi dari sumber lain yang memang masih memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang sudah didapatkan kemudian diuji kembali dengan metode triangulasi. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka tersebut, dilakukan kedalam bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan katagorisasi.

Seperti yang telah dibahas pada bab 3, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga dalam menganalisis data dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan data berlangsung. Oleh karena itu proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kegiatan reduksi data, maka peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kode-kode tersebut ditentukan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun kode-kode tersebut yaitu:

- a. Kode Q menunjukkan daftar urutan pertanyaan
- b. Kode A, B, C dan seterusnya menunjukkan item pertanyaan
- c. I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> dan seterusnya menunjukkan daftar untuk informan

Untuk penyajian data (*display data*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks narasi, tabel dan gambar. Selanjutnya menarik kesimpulan atau mencari makna-makna baru dari hasil yang sudah diperoleh.

#### **4.4 Analisis Hasil Penelitian**

Belum tertatanya sistem pengelolaan persampahan di Kota Tangerang Selatan dan lemahnya sistem pengolahan eksisting mengharuskan ada perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada saat ini. Kota Tangerang Selatan yang memiliki penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa pada tahun 2010, seharusnya sudah memiliki dan menyiapkan sistem operasional yang sistematis dan teratur dalam hal menjalankan kebijakan persampahannya. Akan tetapi karena berbagai hal dan kendala sistem pengelolaan persampahan di Kota Tangerang Selatan belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap sistem pengelolaan sampah eksisting di Kota Tangerang Selatan, dalam kurun waktu 15 tahun mendatang akan dikembangkan dua pendekatan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, yaitu:

- a. Model pengelolaan sampah dengan pendekatan pelayanan dinas secara lebih intensif dan menerapkan operasi pengelolaan terpusat di TPA, dikhususkan untuk wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan
- b. Mengembangkan model sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (*Community Based Solis Waste Management-CBSWM*) yang diprioritaskan untuk wilayah yang tidak terlayani oleh dinas dan menjadi tanggung jawab dinas dalam pengembangan dan pembinaannya.

Adapun untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut, peneliti akan menjelaskan hasil temuan lapangannya ke dalam beberapa indikator berdasarkan teori manajemen pengelolaan menurut G.R Terry yang terdiri dari variabel perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan.

#### **4.4.1. Perencanaan**

##### **4.4.1.1 Sistem Operasi Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap sistem pengelolaan sampah eksisting di Kota Tangerang Selatan, dalam kurun waktu 15 tahun mendatang akan dikembangkan dua pendekatan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, yaitu:

1. Model pengelolaan sampah dengan pendekatan pelayanan dinas secara lebih intensif dan menerapkan operasi pengelolaan terpusat di TPA, dikhususkan untuk wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan
2. Mengembangkan model sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (*Community Based Solis Waste Management-CBSWM*) yang diprioritaskan untuk wilayah yang tidak terlayani oleh dinas dan menjadi tanggung jawab dinas dalam pengembangan dan pembinaannya.

Namun demikian, kedua sistem ini akan menerapkan konsep penanganan dan pengelolaan sampah dimana upaya pengurangan sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Reuse*) dan daur ulang (*Recycle*) diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah dari hulu ke hilir.

Konsep penanganan dan pengolahan model pelayanan intensif adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan pelayanan pengelolaan sampah adalah wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan
- b. Jenis sampah yang dikelola oleh DKPP adalah sampah domestik, yaitu yang bersumber dari aktifitas rumah tangga/domestik, dan aktifitas perkotaan seperti pasar dan daerah komersil, perkantoran, pelabuhan, pariwisata, tetapi tidak termasuk limbah industri dan medis
- c. Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkan dan tidak menjadi tanggung jawab DKPP. Hal tersebut telah diatur oleh undang-undang tentang pengelolaan limbah B3 dari industri untuk dikelola oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah.
- d. Pevadahan, pengumpulan dan pengangkutan di sumber diarahkan menuju sistem terpilah, antara organik dan anorganik yang diimplementasikan secara bertahap
- e. Operasi pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPS, dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW
- f. Pengangkutan dari TPS ke TPST Kota dilakukan oleh DKPP
- g. TPST Kota ditempatkan di daerah strategis dengan pengembangan terpadu
- h. Pengolahan sampah TPST dijalankan dengan prinsip minimasi sampah tertimbun, dengan memaksimalkan pengomposan dan daur ulang. Produk kompos akan dipergunakan sebagai media reklamasi (lahan kering/tandus), sehingga menjadi area hijau, menggeburkan tanah, maupun bahan penggembur tanaman organik.
- i. Pengelolaan sampah di TPST Sakala Kota adalah tanggung jawab Dinas, dan sistem yang diterapkan adalah pengomposan dan pengolahan sampah plastik, serta penimbunan residu dengan metode *Controlled Landfill*. (Sumber: DKPP, 2012)

Seperti apa yang telah dijabarkan diatas, pola pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dijelaskan pula oleh Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah DKPP Kota Tangsel:

*“Model pengelolaan yang pertama ini yang akan kami coba kembangkan, sampah-sampah tersebut pertama kami kumpulkan dari sumber-sumber sampah misalkan pasar atau permukiman masyarakat, kemudian dibawa ke TPS skala kecamatan dengan menggunakan motor-motor sampah yang telah kami siapkan, kemudian diproses dan sisa hasil dari pengomposan tersebut baru dibawa ke TPA Kota dengan menggunakan truck amroll untuk diproses akhir”. (Wawancara dengan Bapak Deden Supriyatna, 16 Juli 2012, pukul 13.30 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Konsep kedua adalah konsep pengelolaan dan pengolahan sampah di wilayah target pengembangan sistem berbasis masyarakat (*Community Based Waste Solid Management*) yang tidak terlayani oleh Dinas ataupun sampah yang tidak terangkut/terlayani oleh Dinas. Konsep ini akan direncanakan sebagai berikut:

- a. Di wilayah target Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat, ditetapkan bahwa operasi pengelolaan harus menerapkan prinsip-prinsip 3R
- b. Di lingkungan RT/RW, diberikan peluang untuk dikembangkannya pengolahan sampah skala komunal dan kawasan, juga dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R
- c. Dalam suatu wilayah kelurahan wajib memiliki satu TPS kelurahan dan dikembangkannya menjadi TPST Tingkat Kelurahan
- d. TPS Kelurahan/Desa adalah lokasi penampungan sampah, dan pengomposan sampah organik yang ditempatkan di setiap Kelurahan untuk melayani 4.750 penduduk dan dikelola oleh masyarakat
- e. Pengomposan dilakukan sebagai usaha minimasi sampah tertimbun di TPA, bukan untuk mencari keuntungan ekonomis. (Sumber: DKPP, 2012)

Dalam konsep pengelolaan ini, lebih melalui pendekatan berbasis masyarakat, dimana setiap kelurahan wajib memiliki TPS untuk skala RT/RW, seperti apa yang diungkapkan oleh Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah sebagai berikut:

*"Untuk pengelolaan dengan konsep kedua ini lebih menekankan kerjasama dengan masyarakat, mereka harus dapat mandiri mengelola sampah di lingkungan mereka, karena sarana dan prasarana telah kami siapkan mulai dari motor sampah sampai tempat pengolahan sampah tersebut serta sosialisasi kegiatan daur ulang dan pembinaan agar dapat menghasilkan kompos dari kegiatan daur ulang tersebut". (Wawancara dengan Bapak Mohammad Ihlis, 16 Juli 2012, pukul 14.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

#### **4.4.1.2 Sistem Pengolahan Sampah**

##### **4.4.1.2.1 Pengomposan**

Pengomposan sampah di Kota Tangerang Selatan bertujuan mengurangi timbulan sampah tertimbun di TPA, disamping itu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Karena itu pengomposan akan dilakukan terpusat di TPA Cipeucang, mengingat jarak tempuh ke TPA Cipeucang masih relatif pendek. Mengacu pada strategi yang telah dikembangkan, dan berdasarkan alasan utama pengembangan pengomposan di Kota Tangerang Selatan.

Maka prinsip dasar dalam rencana pengomposan untuk 10 tahun yang *Pertama* adalah terintegrasi di dalam sistem pengelolaan sampah kota. Bahwa pengomposan sampah dimana pun dalam skala bagaimana pun harus menjadi bagian dalam sistem pengelolaan sampah kota. Hal ini dilakukan agar kinerja pengomposan akan menjadi bagian dari kinerja sistem kota, sehingga kontribusi pengomposan terhadap beban pengelolaan sistem kota menjadi lebih terukur dan signifikan.

*Kedua*, Kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Berdasarkan pengamatan sumber daya manusia dilingkungan intern DKPP, dalam menangani sampah dinilai belum menunjukkan kinerja yang tinggi, maka untuk menjamin kapasitas kerja yang tinggi, pelaksanaan pengomposan dilakukan untuk menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebersihan sebagai berikut:

*"Pengomposan sampah di Kota Tangsel ini perlu direncanakan dengan matang, dimana harus melibatkan masyarakat dan swasta dalam implementasinya, jadi pengomposan ini harus di masukan ke dalam sistem pengelolaan sampah kota, setelah terintegrasi dengan baik barulah kita bermitra dengan masyarakat dan pihak swasta, dengan gitu dijamin sampah akan bermanfaat". (Wawancara dengan Bapak Oki Rudianto, 10 Juli 2012, Pukul 10.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

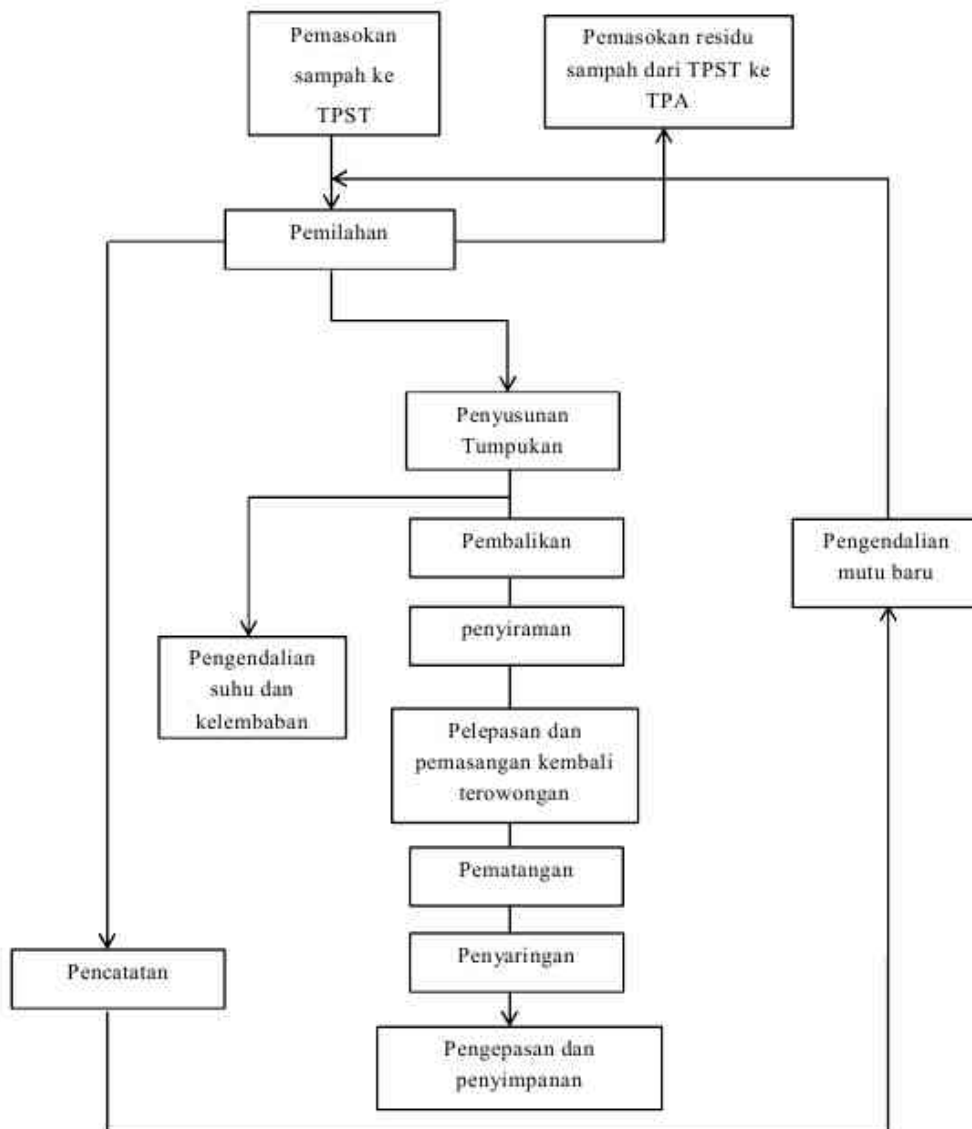
Sebagai salah satu kelompok stakeholder dalam pengelolaan sampah kota, masyarakat sudah seharusnya ditempatkan dengan tepat. Disamping itu, kehadiran swasta yang secara professional memberikan jasa pengomposan dan pengelolaan sampah pun menjadi peluang untuk kemitraan dalam pelaksanaan pengomposan

Dengan ketentuan teknis seperti diatas, maka kebutuhan sarana dan prasarana pengomposan di TPA Cipeucang, adalah sebagai berikut:

- a. Lahan seluas 100 m<sup>2</sup>
- b. Standar bangunan pengomposan skala TPA
- c. Mesin pencacah organik, kapasitas minimal 23 HP, 2-3 m<sup>3</sup>/jam
- d. Mesin pengayak kompos
- e. Peralatan pendukung proses (Sumber: DKPP, 2012)

Dengan pertimbangan luasnya area pengomposan di TPA Cipeucang, maka Metode pengomposan yang akan diterapkan adalah "Open Windrow System" secara umum, operasi pengomposan digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Pengomposan Dengan Open Windrow System**



(Sumber: DKPP, 2012)

Berdasarkan studi timbulan sampah, anorganik yang paling tinggi kehadirannya adalah kertas, plastik dan gelas, namun demikian



sampah plastic lebih bernilai jual tinggi, sehingga peluang untuk dikembangkannya usaha daur ulang plastik lebih besar dari jenis sampah lainnya. Pengolahan sampah anorganik direncanakan dipusatkan di TPA dengan dasar pemikiran, pengumpulan sampah anorganik akan semakin besar dalam lingkup pelayanan yang lebih luas. Tetapi sampah yang nantinya akan diolah dengan menggunakan teknologi komposing ini adalah sampah jenis organik, seperti apa yang dijelaskan oleh Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah berikut ini:

*“Ya, nantinya di TPA Cipeucang ini akan segera dibuat tempat pengolahan sampah dengan metode teknologi komposing, dengan begitu sampah-sampah jenis organik akan kita olah menjadi kompos dengan mesin tersebut, sehingga secara langsung dapat mengurangi timbunan sampah di TPA Cipeucang.” (Wawancara dengan Bapak Deden Supriatna, 18 Juli 2012, Pukul 10.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Dengan kegiatan pengolahan sampah organik yang diolah menjadi kompos di TPA Cipeucang, merupakan bagian dari rencana pengurangan timbunan sampah. Kegiatan seperti ini juga dapat memperpanjang umur teknis TPA Cipeucang dan dapat memberdayakan atau dimanfaatkan masyarakat-masyarakat di sekitar TPA tersebut.

#### **4.4.1.2.2 Sistem Pengelolaan Berbasis Masyarakat**

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (CBSWM), merupakan strategi Kota Tangerang Selatan dalam menangani sampah di wilayah pinggiran kota. Alasan dipilihnya CBSWM sebagai pola penanganan sampah adalah karena karakteristik

CBSWM itu sendiri yang sangat sepadan dengan budaya masyarakat.

CBSWM dapat diartikan sebagai suatu sistem persampahan, dimana:

- a. Direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh warga setempat
- b. Kehadirannya dapat merupakan inisiatif lokal atau difasilitasi oleh inisiator ekstern, seperti:
  1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  2. Lembaga Pemerintah yang berkompeten didalam pengelolaan sampah, dalam hal ini DKPP dan atau Dinas Lingkungan Hidup
  3. Lembaga Pemngabdian Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi yang memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan pada umumnya, khususnya pada masalah pengelolaan sampah (Sumber: DKPP, 2012)

Terdapat 5 (lima) prinsip utama yang menjadi dasar pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. yaitu:

1. Prinsip Keterlibatan Warga, dimana CBSWM harus direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dan diawasi dengan melibatkan setiap warga yang memiliki hak dan kewajiban setara
2. Prinsip Kemandirian, dimana suatu CBSWM harus dikelola secara mandiri sesuai dengan kemampuan sumber daya menerus yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok warga
3. Prinsip Efisiensi, dimana suatu CBSWM harus dikelola seefisien mungkin dengan biaya yang minimal dan penggunaan sumber daya yang optimal untuk memperoleh manfaat yang maksimal
4. Prinsip Pelestarian Lingkungan, dimana suatu CBSWM harus mampu menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dari sampah, melakukan upaya pemanfaatan sampah (*waste recovery*) seoptimal mungkin, dan mencegah dampak buruk lain yang dapat terjadi dari kegiatan pengelolaan sampahnya
5. Prinsip Keterpaduan, dimana suatu CBSWM harus memiliki elemen sistem yang terpadu dengan sistem pengelolaan luar-wilayah yang dikelola oleh instansi kebersihan milik pemerintah setempat (Sumber: DKPP,2012)

Dari kelima prinsip diatas sudah jelas bahwa CBSWM merupakan pengelolaan sampah yang mengutamakan potensi-potensi

yang ada dalam masyarakat, seperti apa yang diungkapkan oleh Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah, berikut ini:

*"Ya, pengelolaan CBSWM ini merupakan teknik pengelolaan dengan masyarakat sebagai subyek dan objek dari aturan maennya, kita disini hanya memfasilitasi saja keperluan yang mereka butuhkan, tetapi konsep perencanaan, pengembangan serta pengoperasian dikelola oleh warga setempat itu sendiri, dan pihak DKPP wajib memonitoring setiap kegiatan mereka". (Wawancara dengan Bapak Deden Supriatna, 15 Agustus 2012, Pukul 11.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Mengacu kepada ke-5 prinsip di atas, suatu wilayah yang menerapkan pola CBSWM harus memenuhi beberapa persyaratan aspek teknis, sosial-budaya, lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan peraturan, sebagai berikut:

1. Kejelasan batasan waktu  
Wilayah CBSWM harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan kesepakatan warga. Wilayah layanan sebaiknya ditentukan dengan batasan wilayah yang umum dikenal misalnya RT, RW maupun Kelurahan atau lebih luas dari itu
2. Peran Serta Masyarakat  
Peran serta masyarakat didalam pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu proses perlibatan seluruh stakeholder dalam menentukan arah, menjalankan proses dan mencapai tujuan bersama. Seluruh kelompok stakeholder harus selalu dilibatkan dalam proses perencanaan, pengoperasian, penentuan anggaran, perolehan dana operasional, penilaian kinerja, penentuan struktur organisasi pengelola dan lainnya. Mekanisme keterlibatan stakeholder harus diatur dengan jelas dan dipahami semua pihak.
3. Strategi Pengelolaan Sampah yang Terpadu  
Strategi yang dimiliki oleh suatu CBSWM harus menguraikan secara rinci dan kuantitatif tentang pola tindakan terhadap berbagai jenis sampah yang timbul, mulai dari upaya pewadahnya sampai ke upaya penampungan dan pemusnahannya. Termasuk kedalam strategi pengelolaan sampah ini adalah keterkaitan antara sistem CBSWM dengan sistem kebersihan yang dijalankan oleh instansi kebersihan pemerintah. Sesuai prinsip sebelumnya, penentuan strategi ini harus

dilakukan melalui proses pelibatan warga (*participatory process*) dan konsultasi dengan pemerintah.

4. Upaya Pemanfaatan Sampah yang Optimal

CBSWM harus mengoptimalkan upaya pemanfaatan sampah untuk mendukung: a) upaya pelestarian lingkungan, b) pemanfaatan produk sampah, c) perolehan dana operasional, d) pengurangan beban kerja instansi pengelola kebersihan pemerintah. Tanpa adanya upaya tersebut, makna keberadaan CBSWM akan tidak berarti. Minimal CBSWM harus mempertimbangkan adanya tindakan pengomposan terhadap sampah layak-kompos (*compostable*) dan tindakan penjualan sampah layak-daur (*recyclable*). Optimasi pemanfaatan sampah akan didukung oleh rencana pemilahan, penyiapan, proses produksi, penyaluran produknya, dan mekanisme jual-belinya.

5. Sarana Persampahan yang Memadai

Sarana yang dimiliki CBSWM harus mampu mendukung keberlangsungan sampah terpadu. Sarana yang dibutuhkan antara lain adalah: a) wadah sampah (yang mendukung upaya pemilahan sampah pada sumbernya), b) gerobak pengumpul sampah, c) depo penampungan sementara, d) fasilitas pengomposan, e) fasilitas penyiapan bahan layak daur ulang, dan f) fasilitas penampungan sementara

6. Minimalisasi dampak lingkungan

Sarana dan pola kerja yang digunakan dalam suatu CBSWM tidak boleh menimbulkan dampak lingkungan lain yang ternyata lebih berbahaya dari dampak sampah itu sendiri

7. Kejelasan Organisasi Pengelolaan Sampah

Kehadiran organisasi baik formal maupun non formal yang memegang kendali kegiatan CBSWM, harus difasilitasi oleh pihak inisiator. Hal ini menjadi penting untuk keberlanjutan CBSWM ketika inisiator tidak lagi mendampingi masyarakat. Sedapat mungkin, organisasi dibentuk atas kebutuhan warga, dan beranggotakan warga setempat.

8. Optimasi Sumber Pendanaan Sendiri

CBSWM harus memiliki sumber pendanaan yang jelas untuk memenuhi biaya operasi dan pengembangannya. CBSWM harus dapat mengandalkan sumber dananya sendiri, seperti iuran warga, penjualan produk pemanfaatan sampah, kontribusi pihak lain yang diupayakan sendiri. Bantuan pendanaan dari pemerintah sebaiknya diberikan sesuai dengan manfaat keberadaan CBSWM terhadap sistem persampahan yang dikelola pemerintah.

9. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja

CBSWM harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, baik terhadap kinerja administrasi, kinerja teknis, maupun kinerja keuangan. Mekanisme pertanggungjawaban harus

didukung dengan sistem penilaian yang konsisten agar mempermudah proses perbandingan kinerjanya secara periodic

#### 10. Integrasi CBSWM dalam sistem pengelolaan sampah kota

Kehadiran CBSWM harus terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah kota. Pengakuan CBSWM sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang dijalankan oleh pemerintah adalah penting. Tanpa itu, eksistensi CBSWM akan selalu menjadi pertanyaan berbagai pihak yang meragukan kemampuan masyarakat. (Sumber: DKPP, 2012)

Persyaratan diatas dalam pelaksanaan pengembangan suatu CBSWM, akan sangat bervariasi tergantung dari karakteristik tiap wilayah CBSWM itu sendiri.

Wilayah pengembang sejak beberapa tahun terakhir ini di Kota Tangerang Selatan, telah banyak diupayakan pengembangan pengelolaan sampah bersama masyarakat. Masyarakat mengajukan permohonan bantuan peralatan, dan Pemerintah mengadakannya. Namun demikian, konsep yang diterapkan tidak satu pun memenuhi kriteria CBSWM. Untuk itu pihak DKPP menanggapi permasalahan kurangnya sarana dan prasarana segera melakukan solusi, dengan memberikan 81 unit gerobak motor sampah, yang akan dibagikan ke tujuh kecamatan yang berada dikawasan Kota Tangerang Selatan, yang kemudian dibagikan kembali ke tingkat kelurahan, agar konsep pengelolaan CBSWM ini segera terealisasikan, seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebersihan, berikut ini:

*"54 armada gerobak motor sampah tersebut akan disebar di setiap kelurahan yang ada di Kota tangerang Selatan, sementara 27 sisanya digunakan untuk pengangkutan sampah di jalan besar". (Wawancara dengan bapak Oki Rudianto, Tanggal 10 Juli 2012, Pukul 10.15 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Pihak DKPP berharap keberadaan gerobak motor pengangkut tersebut akan mempermudah petugas melakukan pengangkutan sampah di Kota Tangerang Selatan. Jika hanya mengandalkan truk pengangkut sampah, pihak DKPP akan kesulitan mengangkut seluruh sampah di Kota Tangerang Selatan, mengingat kapasitasnya yang terbatas

Selain memberikan program 81 gerobak motor sampah, pihak DKPP ini pun mulai tahun 2013 akan mensosialisasikan mengenai bank sampah kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui nilai manfaat sampah jika dikelola dengan baik, seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebersihan, berikut ini:

*"Sampah itu memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik, agar masyarakat juga peduli terhadap permasalahan sampah, terutama sampah rumah tangga baik itu sampah organik atau sampah non organik". (Wawancara dengan bapak Oki Rudianto, Tanggal 26 Desember 2012, Pukul 11.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Dengan adanya bank sampah dan TPST3R, diharapkan tahun yang akan datang sampah lebih didayagunakan atau diberdayakan sekalipun kita kekurangan SDM. Karena Kota Tangerang Selatan ini masih daerah baru, yang baru empat tahun, geliatnya belum begitu berasa, tetapi pihak DKPP berupaya memaksimalkan kedepannya agar geliat ini semakin baik kedepannya.

Sama halnya dengan wilayah perkotaan lainnya, dimana lahan terbatas, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan setiap penduduk baik penduduk tetap wilayah tersebut maupun penduduk yang hanya melintas sebagai produsen aktif sampah. Pada sisi lain lahan untuk membuang sampah merupakan masalah yang cukup dilematis. Membuang sampah ke wilayah tetangga, hampir merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Membuang sampah di daerah sendiri dihadapkan pada keterbatasan lahan, mahalnya harga tanah, dan kepadatan penduduk. Kondisi tersebut mendorong pengelola kota untuk berpikir keras bagaimana mendapatkan solusi terbaik dalam penanganan sampah perkotaan.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penanggulangan masalah sampah perkotaan, yakni dengan mengoperasikan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R atau Reduce, Reuse, Recycle secara tercluster pada tiap-tiap wilayah Rukun Warga.(RW) Pengolahan sampah di TPST akan sangat membantu mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke TPA di Cipeucang. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan berikut ini:

*"Masyarakat hanya menyediakan lahan saja, sedangkan proses pembangunan hingga pengadaan alat siap ditanggung pemerintah, karena permasalahan yang ada dalam pengembangan TPST skala RW adalah lahannya yang selalu menjadi sengketa". (Wawancara dengan Bapak Bahrudin, 18 Juli 2012, Pukul 11.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Tercatat sampai tahun 2012, sudah sebanyak 10 TPST yang dikembangkan oleh pihak DKPP diantaranya seperti, di 2 titik lokasi, yaitu di Perumahan Griya Serpong -Kelurahan Kademangan-Kecamatan Setu dan Villa Pamulang Mas-Kecamatan Pamulang. Sementara di tahun 2011 ada 8 TPST 3R, dimana 6 titik lokasi pembangunannya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui KSM-KSM yang telah dibentuk. Yakni di Kelurahan Pondok Betung, Pondok Karya, Pondok Maharta, Reni Jaya, Jombang dan Sarimulya. Serta 2 diantaranya dilakukan pihak ketiga (kontraktual), yaitu di Perumahan Pamulang Permai I dan Benda Baru. (Sumber: DKPP,2012).

Masalah sampah tidak hanya sekedar hanya bagaimana mengolah atau mengelola sampah saja. Namun, juga terkait dengan masalah budaya. Masyarakat perkotaan umumnya tidak peduli tentang sampah, suka membuang sampah sembarangan dan cenderung mementingkan diri sendiri. Paradigma yang salah seperti ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa masalah sampah tidak pernah berhasil diatasi. Merubah paradigma masyarakat tentang sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanganan sampah secara terpadu.

Permasalahan utama belum terbangunnya sistem itu sendiri sehingga tidak dapat dipastikan keberlanjutannya, Perlibatan masyarakat didalam suatu program pembangunan CBSWM,



merupakan suatu proses berkesinambungan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi
- b. Penyebaran informasi
- c. Pertukaran informasi
- d. Konsultasi (Sumber: DKPP, 2012)

Masyarakat tidak mungkin terlibat tanpa adanya penyampaian informasi dan konsultasi antara pembawa pesan dan masyarakat. Kegiatan pengembangan CBSWM memerlukan persiapan strategi komunikasi dengan prinsip partisipatif dan *community development*. Seperti apa yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

*"Ya, konsep CBSWM ini sudah kami sosialisasikan sejak 6 bulan terakhir, dimana kami setiap satu bulan melakukan seminar sosialisasi CBSWM di kantor-kantor kecamatan atau kelurahan, guna mendengar aspirasi para masyarakat dan kamu pun sigap menindak lanjuti usulan dari mereka, agar terjadi feedback antara pemerintah dan masyarakat".  
(Wawancara dengan Ibu Dinar, 29 Agustus 2012, pukul 13.30 WIB, di Kantor DKPP Pamulang)*

Diperlukan bauran media yang luas dan bervariasi sehingga komunikasi yang dijalankan lebih efektif, sarana dan prasaran pengelolaan sampah senantiasa menjadi kebutuhan, bersamaan dengan proses pembelajaran yang tengah dilakukan.

#### **4.4.1.3 Budgeting (Pembiayaan)**

Aspek pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan persampahan Kota Tangerang Selatan saat ini masih didanai dari APBD Kota, sementara untuk struktur tarif dan mekanisme pemungutan retribusi sejauh ini masih menginduk kepada daerah Kabupaten Tangerang, karena perda tentang struktur dan tarif retribusi kota Tangerang Selatan belum terbentuk. Berdasarkan data DKPP, yang menjadi objek/sumber retribusi untuk pelayanan persampahan meliputi:

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
- c. Penyediaan TPA, dan
- d. Pembuangan dan atau pemusnahan sampah

Sedangkan objek yang tidak termasuk kedalam sumber pembiayaan atau dikenakan retribusi pelayanan persampahan adalah :

- a. Pelayanan kebersihan jalan umum
- b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum

Jenis kegiatan yang potensi untuk ditarik retribusi, tidak mampu diserap secara keseluruhan oleh DKPP karena, ada sebagian sumber retribusi telah dikelola oleh pihak swasta, misalnya perumahan, ruko/perdagangan dan juga hotel. Besarnya retribusi yang dibebankan kepada sumber kegiatan sangat bervariasi, misalnya retribusi untuk permukiman adalah Rp.7000 s/d 35000 dan untuk kegiatan perdagangan jasa maupun perkantoran mencapai Rp.50000 s/d 250.000.

Tidak terdatanya anggaran yang masuk maupun yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan menjadi kendala

tersendiri dalam melakukan analisis pembiayaan. Biaya yang ada, sifatnya hanya biaya yang diperoleh secara insidental, misalnya biaya retribusi yang dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (berupa PERDA), sehingga hal ini akan berimbas kepada adanya otoritas pemungutan liar yang mungkin terjadi dan ketimpangan dalam relokasi penyusunan anggaran. Hal tersebut dibenarkan oleh pemaparan Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan sampah kepada peneliti, sebagai berikut:

*"Ya, kondisi seperti ini sangat rentan terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena belum jelas soal biaya retribusi, sampai sekarang saja Perda soal penanganan dan pengelolaan sampah di Tangsel aja belum disahkan oleh DPRD". (Wawancara dengan bapak Moh. Ihlis, 16 Juli 2012, Pukul 14.15 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Karena itu dalam penanganan sampah diperlukan dana untuk biaya pengelolaan pelayanan persampahan. Keterbatasan menyebabkan kurangnya optimalisasi aset yang ada, maka muncul usaha untuk memperbesar pendapatan yang salah satunya berasal dari penarikan retribusi kebersihan, sehingga mampu menutup besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dalam membayar retribusi kebersihan. Biaya-biaya dalam operasi dan pemeliharaan yang harus disiapkan, terdiri dari komponen-komponem biaya tetap dan komponen-komponem biaya variabel, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5 Komponem-Komponem Biaya Tetap dan Variabel  
Dalam Proses Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah**

<b>No</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Komponem Pembiayaan</b>
<b>A</b>	<b>Biaya-Biaya Tetap</b>	
1	<b>Pengumpulan / Penyapuan Jalan</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. Peralatan Kebersihan d. Perjalanan Dinas
2	<b>Pengangkutan Sampah</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. BBM d. Pelumas e. Suku Cadang
3	<b>Daur Ulang (komposting)</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian
4	<b>Pengelolaan TPA</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. BBM d. Pelumas e. Suku Cadang
5	<b>Administrasi Pendukung</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. Listrik, air dan telepon d. Perjalanan Dinas e. Lain-lain/ over head
<b>B</b>	<b>Biaya-Biaya Variabel</b>	
1	<b>Pengumpulan / penyapuan jalan</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. Peralatan kebersihan
2	<b>Pengangkutan sampah</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. BBM d. Pelumas e. Suku Cadang
3	<b>Daur Ulang (komposting)</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian
4	<b>Pengelolaan TPA</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. BBM d. Pelumas e. Suku Cadang

5	<b>Administrasi Pendukung</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. Pakaian Listrik, air dan telepon d. Perjalanan dinas e. Lain-lain / over head
---	-------------------------------	--

**Tabel 4.6 Estimasi Coba-Coba Komponem-Komponem Biaya Tetap Dalam Proses Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah**

Jenis Pembiayaan	Komponem Pembiayaan	Jumlah Personil	Biaya Per Bulan	Biaya Per Tahun
<b>Biaya-Biaya Tetap</b>				
<b>Pengumpulan/penyapuan jalan</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. Peralatan kebersihan d. Perjalanan Dinas	232	57.890.000 23.156.000 1.000.000 -	694.680.000 277.872.000 12.000.000
<b>Pengangkutan sampah</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. BBM d. Pelumas e. Suku Cadang	240	120.050.000 24.010.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000	1.440.600.000 288.120.000 36.000.000 30.000.000 60.000.000
<b>Daur ulang (komposting)</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian	5	2.500.000 500.000	30.000.000 6.000.000
<b>Pengelolaan TPA</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. BBM d. Pelumas e. Suku Cadang	5	5.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 5.000.000	60.000.000 6.000.000 12.000.000 18.000.000 60.000.000
<b>Administrasi Pendukung</b>	a. Upah/gaji b. Pakaian c. Listrik, air dan telepon d. Perjalanan Dinas e. Lain-lain / over head	44	66.000.000 8.800.000 1.500.000 - -	792.000.000 105.600.000 18.000.000
<b>Total</b>			<b>328.906.000</b>	<b>3.946.872.000</b>

(Sumber: DKPP, 2012)

Estimasi biaya tetap dan variabel diatas, sudah jelas menggambarkan bagaimana kebutuhan anggaran yang besar, yang harus segera dianggarkan dan disusun dalam RAPBD Kota Tangerang Selatan 2013-2014, karena dalam Raperda Pengelolaan Sampah disana tidak disebutkan penarikan biaya kepada masyarakat, kecuali apabila terjadi pelanggaran baru kami mengambil iuran akibat sanksi dari pelanggaran masyarakat tersebut bila melakukan buang sampah sembarangan.

Tetapi pada kenyataannya biaya retribusi yang direncanakan diatas tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, pihak DKPP menarik biaya retribusi sebesar RP. 15.000 per-KK, Hal ini sangat diberatkan oleh warga Kota Tangerang Selatan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga perumahan pesona serpong, berikut ini:

*"Sebenarnya seperti apasih prosedur pengangkutan sampah oleh DKPP ke TPST, sehingga kami harus membayar uang sebesar Rp 15 ribu per-KK, padahal letak wilayah kami hanya berjarak 1-2 KM saja dari TPA, bagaimana warga lain yang letaknya jauh dari sini".(Wawancara dengan bapak sobirin, 10 Januari 2013, Pukul 10.00 WIB, di Perumahan Pesona, Serpong)*

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Kebersihan DKPP kepada peneliti, sebagai berikut:

*"Sampai saat ini kami belum ada Perda soal jasa umum, kami masih menginduk ke Kabupaten Tangerang dan ada retribusinya tetapi untuk masalah besar kecilnya pungutan, itu bisa dimusyawarahkan kembali melalui musyawarah RT/RW". (Wawancara dengan bapak Oki, 11 Januari 2013, Pukul 11.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Prosedur yang kurang jelas serta belum di sahkannya Perda tentang pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, menambah

masalah yang semakin hari menjadi kacau, sehingga diperlukan keseriusan dari pihak DKPP dalam menyelesaikan semua masalah persampahan di Kota Tangerang Selatan, agar visi dan misi membuat kota ini bebas dari sampah segera terealisasi.

#### **4.4.2 Pengorganisasian**

##### **4.4.2.1 Kelembagaan**

Saat ini timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan belum terkelola dengan baik. Walau diperkirakan percepatan peningkatan timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan belum akan meningkat tajam, namun penanganan sampah perlu dilakukan sejak dini sebelum timbul masalah sehingga cost yang menjadi beban bagi pemerinatah tidak akan menjadi tinggi secara mendadak.

Penetapan tanggung jawab lingkup tugas yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola sampah harus ditetapkan dengan jelas. Ruang lingkup pengelolaan kebersihan kota sangat luas, dan bila dihubungkan dengan sumber-sumber timbulan diantaranya, sampah pemukiman, pasar, perkantoran industry dan perdagangan, komersial, Rumah Sakit, jalan, saluran, sungai dan masih banyak lagi. Apabila tanggung jawab pengelola sampah kota tidak secara jelas ditetapkan, maka akan terjadi saling lempar tanggung jawab diantara pengelola infrastruktur yang akibatnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tidak berjalan secara efisien dan efektif. Seperti apa

yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagai berikut:

*"Dengan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab dari setiap lembaga pengelola, khususnya di Kota Tangsel yang dikelola oleh kami selaku Dinas Kebersihan, maka kami akan melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan tupoksi kami yang telah diatur oleh undang-undang". (Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, 29 Agustus 2012, Pukul 14.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Luasnya ruang lingkup pengelolaan sampah tidak saja disebabkan oleh sumber-sumber asal sampah tapi juga jenis dan karakteristiknya. Sampah dengan karakteristik tertentu tidak dapat dikelola bersama-sama dengan sampah karakteristik lainnya. Sebagai contoh, tempat medis atau yang berasal dari rumah sakit atau tempat-tempat pengobatan lainnya harus dikelola secara terpisah dari rumah tangga, demikian juga sampah yang berasal dari lingkungan pelabuhan ikan, diperlukan penanganan khusus, tidak bisa digabung dengan sistem lainnya.

Dengan demikian maka harus ada kejelasan sampah yang mana yang menjadi tanggungjawab dalam pengelolaan oleh dinas teknis pengelolaan sampah. Penetapan kejelasan tanggung jawab biasanya lebih terarah pada lingkup tugas secara operasional. Pengelolaan sampah tidak hanya terbatas pada pembagian tugas dan tanggungjawab secara operasional, tetapi juga dalam hal kewenangan dalam pengaturan. Pengaturan kewenangan harus perlu dilakukan diantara lembaga dalam pemerintah kota, mengingat seperti



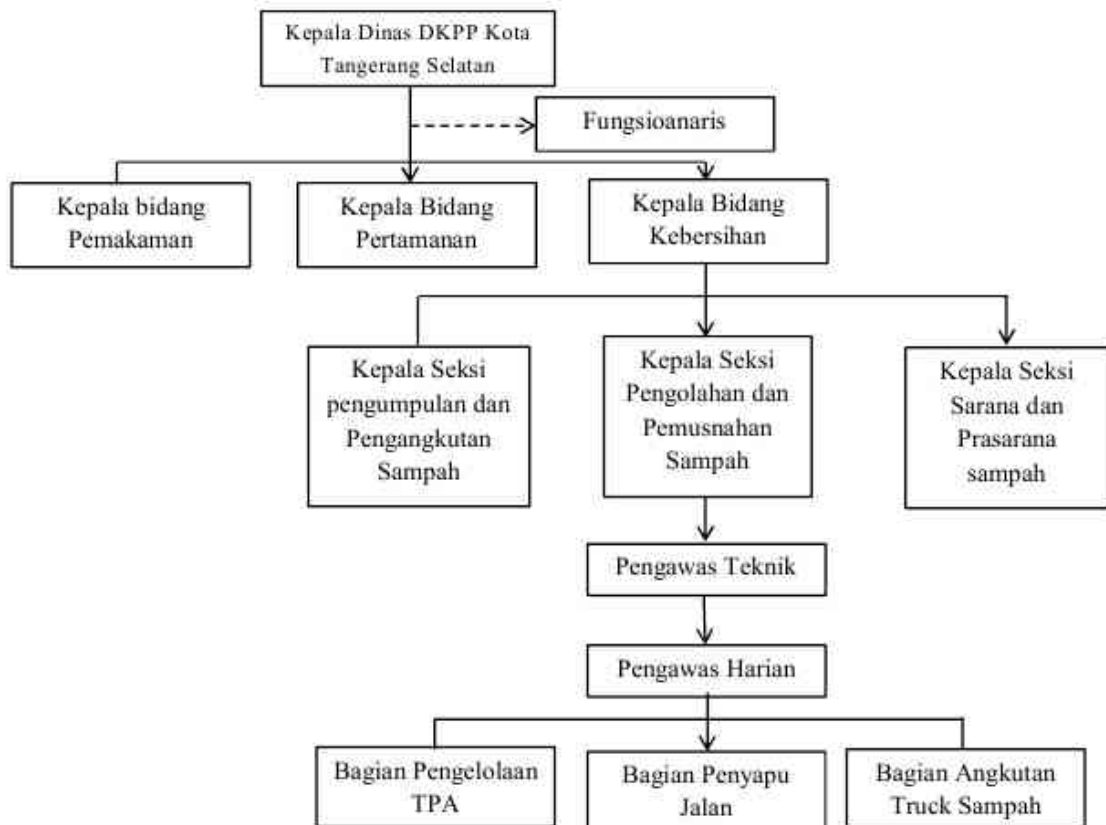
kewenangan dalam investasi peralatan, kewenangan dalam penagihan, kewenangan dalam penerapan sanksi dan lainnya.

Bentuk lembaga pengelola kebersihan di Tangerang Selatan yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) pada dasarnya sudah cukup tepat untuk mengelola kebersihan di wilayah Tangerang Selatan pada periode 10 tahun dengan pertimbangan:

- a. Jumlah penduduk urban yang harus dilayani,
- b. Jumlah beban timbulan sampah yang harus dikelola
- c. Jumlah saran dan prasarana yang digunakan
- d. Kebutuhan alokasi anggaran
- e. Kebutuhan kapasitas kelembagaan yang memadai
- f. Urusan yang harus dijalankan sudah jelas (Sumber: DKPP, 2012)

Adapun struktur organisasi DKPP sebagai alternatif lembaga pengelola kebersihan di Kota Tangerang Selatan, direncanakan seperti berikut ini

**Gambar 4.3 Usulan Struktur Organisasi Pengelola Kebersihan Berbentuk Dinas**



(Sumber: DKPP, 2012)

Dengan usulan struktur diatas sudah jelas, bahwa dalam proses pembagian pekerjaan atau tugas lebih terfokus, dimana bagian kebersihan lebih diutamakan lagi, khususnya bidang pengolahan dan pemusnahan sampah, dengan ditambahkannya bagian pengawas teknik dan harian. Kemudian tugas bagian pengawas harian dibantru oleh bagian pengelolaan, bagian penyapu jalan dan bagian angkutan

truck sampah sehingga proses implementasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

#### **4.4.2.2 Struktur Organisasi dan Kerjasama Antar Stakeholder**

Struktur organisasi merupakan alat bagi kelembagaan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan sampah Tangerang Selatan memerlukan struktur organisasi yang memadai agar seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan sesuai tujuan. Tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga kondisi kebersihan kota dapat terjamin.

Organisasi pengelolaan kebersihan harus memiliki kedudukan yang jelas didalam struktur organisasi Pemerintah Kota. Dengan kedudukan yang jelas, akan diketahui bagaimana hubungan kerja (komando, delegasi wewenang dan koordinasi) antara organisasi pengelola kebersihan terhadap komponen organisasi lain dalam organisasi Pemerintah Kota baik secara vertikal maupun horizontal. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

*"Dalam organisasi kejelasan kedudukan sangat diperlukan, sehingga komando pemberian perintah kepada bawahan jelas, dari siapa dan kemana tugas itu diarahkan, sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan koordnasi antar bagian menjadi baik". (Wawancara dengan Ibu Dinar, 29 Agustus 2012, Pukul 14.30, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Struktur organisasi lembaga pengelola kebersihan itu sendiri, meliputi pengaturan unit-unit kerja yang harus ada dalam

struktur untuk menjalankan fungsi organisasi sehingga seluruh tugas dan tanggungjawab dari pengelola kebersihan dapat terselenggara dan dapat mencapai tujuan organisasi.

Keberhasilan penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah ditentukan oleh peran serta atau kerjasama dari seluruh aktor yang terkait dengan sistem pengelolaan sampah kota. Lembaga pengelola sampah kota pada satu sisi berperan sebagai penyedia layanan kepada para pengguna jasa, tetapi diantara pengguna jasa itu sendiri adalah lembaga-lembaga yang ada dalam organisasi Pemerintah Kota.

Dalam mengelola dan merumuskan kebijakan di bidang kebersihan khususnya di bidang persampahan, pihak DKPP tidak berjalan secara sendirian, namun melibatkan banyak instansi pula yang berada dikawasan kompleks pemerintahan Kota Tangerang Selatan, seperti dalam merumuskan AMDAL (analisis masalah dampak lingkungan) yang sekarang ini sedang digarap, bekerjasama dengan pihak BLH (badan lingkungan hidup) dan Dinas PU (pekerjaan umum) dalam merumuskan dan membuat rencana strategi Kota Tangerang Selatan 10 tahun kedepan, seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah kepada peneliti, sebagai berikut:

*"Dalam hal ini, kami selaku pihak DKPP selalu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan dinas-dinas lain yang terkait, misalnya Dinas PU dan BLH, kedua dinas ini sangat terkait dengan kami, terutama dalam mengelola Kota Tangerang Selatan menjadi nyaman, maka dari itu ketiga dinas ini melakukan kerjasama dalam hal*

*merumuskan AMDAL Kota Tangerang Selatan yang insyaallah taun depan sudah rampung". (Wawancara dengan Bapak Deden Supriatna, 21 September 2012, Pukul 11.35 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Kerjasama antara lembaga penyedia jasa dengan pengguna jasa sangat penting untuk mencapai sukses baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan. Satu hal penting adalah efektifitas dan kelangsungan sistem pengelolaan sampah tergantung komitmen dari seluruh pihak sebagai stakeholder untuk berperan serta atau bekerjasama.

#### **4.4.3. Pengarahan**

##### **4.4.3.1. Style (Gaya Kepemimpinan)**

Kepemimpinan merupakan cara seseorang dalam berupaya mempengaruhi orang lain didalam suatu organisasi agar melakukan agar melakukan sesuatu dengan maksud mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Cara setiap orang dalam memimpin sebuah organisasi akan memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada gaya kepemimpinan yang mereka gunakan. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari pimpinan organisasi tersebut. Pada pembahasan ini, peneliti akan membahas gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan sikap pimpinan didalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan peran pemimpin dalam organisasi merupakan hal yang

sangat penting dan berpengaruh terhadap kemajuan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai gaya kepemimpinan Kepala Bidang Kebersihan yang dilihat dari bagaimana sikapnya dalam penyelesaian masalah yang ada termasuk didalamnya penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawainya, bagaimana hubungannya dengan semua pegawai serta bagaimana proses bimbingan dan pengawasan yang dilakukan terhadap pegawainya.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dalam memberikan tugas kepada setiap pegawai yang ada, selalu berpegang teguh pada aturan tentang Susunan Tata Kerja yang ada. Jadi, semua tugas yang dibebankan sesuai dengan fungsi dari setiap pegawai. Ketika pegawai mengalami masalah dalam menjalankan tugasnya. Kepala Bidang Kebersihan tidak langsung melakukan penyelesaian tugas pegawai tersebut, tetapi terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya dan jika tidak berhasil, maka Kepala Bidang Kebersihan akan turun tangan dalam penyelesaian tugas tersebut. Seperti apa yang diungkapkan oleh beliau kepada peneliti, sebagai berikut:

*"Jadi pembedaan tugas pada semua pegawai itu saya selalu melihat acuan, kan ada susunan tata kerjanya jadi tidak semena-mena biarlah para pegawai bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Karena misalnya ada masalah dalam tugasnya, yah kasih kesempatan mereka untuk menyelesaikannya, tidak lantas saya turun tangan nantinya ketergantungan. Nanti kalau seandainya masih belum selesai juga yah baru kita bantu". (Wawancara dengan Bapak Oki, Tanggal 18 September 2012, Pukul 13.30 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Hal senada juga diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai lapangan pengangkut sampah sebagai berikut :

*"Beliau itu memberikan tugas ya sesuai dengan tugas dari pegawainya masing-masing kita sebagai bawahan harus ngerjain tugas itu dengan baik. Ketika kita ada masalah, selagi masih bisa kita atasi, kita atasi tetapi selagi kita mentok ada masalah, ya tentulah pasti bantu ke atasan, beliau kan pimpinan kami. Pasti istilahnya kita konsultasi. Bagaimana baiknya dan beliau pun memberikan solusi sebaiknya bagaimana, begitu." (Wawancara dengan Bapak Didit, Tanggal 21 September 2012, Pukul 10.00 WIB di Pasar Serpong)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sikap kepala bidang kebersihan dalam melakukan penyelesaian tugas pegawainya dinilai baik oleh pegawainya, dan selalu bersikap tidak segan untuk turut campur tangan didalamnya jika pegawai tersebut memang tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain kepala bidang kebersihan selaku pimpinan selalu memberikan kesempatan untuk pegawainya untuk menyelesaikan permasalahan dalam tugasnya terlebih dahulu. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah, berikut ini:

*"Ya, untuk masalah mungkin dari bawah atau darimana pimpinan selalu kasih kesempatan semua pegawainya untuk menyelesaikannya kalau sekiranya masih belum selesai yah saling kerjasama saja yang namanya pekerjaan kan ada beban berat, kalau beban terlalu berat ya saling topang-menopang saja, nanti baru kalau memang tidak menemukan jalan keluar, beliau yang menyelesaikannya. Beliau tidak segan untuk turun langsung membimbing kami dalam setiap masalah". (Wawancara dengan Bapak Deden Supriatna, 21 September 2012, Pukul 11.30 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Menyimak hasil wawancara diatas, menurut analisis peneliti bahwa tidak hanya sikap pemimpin dalam menyelesaikan tugas pegawai yang menghadapi masalah tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan dalam organisasi ketika menghadapi permasalahan, kepala bidang kebersihan selalu mengikutsertakan pegawainya dalam pengambilan keputusannya. Beliau selalu meminta pendapat, saran ide-ide dari para pegawainya yang ada di bidang Kebersihan. Sehingga, hasil akhir atau keputusan yang ditentukan oleh beliau merupakan keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah bersama para pegawainya.

Selain itu, hubungan beliau selaku pemimpin di bidang kebersihan DKPP Kota Tangerang Selatan terhadap semua pegawai di bidang kebersihan dinilai mampu mengayomi semua pegawainya, hubungan yang terjalin tidak hanya sebagai seorang atasan kepada bawahannya, tetapi disaat tertentu beliau juga bisa berlaku seperti layaknya seorang bapak terhadap anak-anaknya. Hal ini berdasarkan



hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Kebersihan, berikut ini:

*"Beliau itu orangnya tegas tetapi untuk hubungannya dengan semua pegawai itu tidak kaku, selalu akrab dengan kami saling menegur sapa, istilahnya kami disini itu satu keluarga, beliau sebagai leader atau kepala rumah tangga disini." (Wawancara dengan Bapak Bahrudin, 21 September 2012, Pukul 11.45 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Pendapat yang sama mengenai hubungan kepala bidang kebersihan terhadap semua pegawai yang ada juga diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah, berikut ini:

*"Hubungan beliau baik-baik saja contohnya jika ada pegawai yang senior walaupun udah pensiun, tapi tetap masih suka berkunjung kemari, beliau selalu menerima dengan pintu terbuka, ini menandakan hubungan atau relasi berjalan dengan baik." (Wawancara dengan Bapak Moh. Jhlas, 21 September 2012, Pukul 11.50 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Selama peneliti melakukan penelitian di kantor DKPP, peneliti juga melakukan wawancara dengan pekerja lapangan mengenai gaya kepemimpinan Kepala Bidang Kebersihan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengemudi angkutan kebersihan sekaligus pekerja lapangan, sebagai berikut:

*"Beliau itu baik dalam segala bidang, mau ilmu ataupun perlakuan sehari-hari, kenapa? Soalnya saya juga betah kalau memang hubungan sama pegawainya tidak baik, saya juga gak mungkin betah, walaupun emang gaji jadi kuli sampah gak seberapa, tapi saya nyantai dan nyaman jalannya". (Wawancara dengan Bapak Agus Sunarya, 21 September 2012, Pukul 10.10 WIB, di Pasar Serpong)*

Hal yang senada juga diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu kenek mobil pengangkut sampah. Berikut ini:

*"Sikap pemimpin itu baik sekali sama semua pegawainya. Tidak pernah membedakan pegawainya, beliau itu sepertinya bisa menjalin hubungan sama siapa saja, baik sama pegawai tetap atau pegawai honorer seperti kami ini yang setiap harinya ngangkutin sampah paling ketemu dengan beliau kalau pas gajian ngambil bayaran ke kantor". (Wawancara dengan Bapak Fitrah, 21 September 2012, pukul 10.20 WIB, di Pasar Serpong)*

Selain itu, pemberian sanksi kepada para pegawai juga sudah berjalan meskipun sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran dan peringatan yang diberikan Kepala Bidang kepada pegawai yang memiliki kesalahan, tetapi melalui teguran tersebut dapat membuat pegawai menyadari kesalahannya dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengolahan dan Pemusnahan berikut ini: Sampah

*"Oh, sudah pasti jelas ada sanksi artinya begini, ya pertama sih hanya teguran saja, umpamanya ada staff yang males itu di tegur sama beliau, lalu di panggil untuk menghadap ke ruangannya untuk diberikan wejangan atau bimbingan nasehat agar tetap semangat menjalankan tugas pekerjaannya, apabila teguran pertama tidak dihiraukan maka akan SP 1 dimana pelaku akan diberikan hukuman yang lebih berat lagi". (Wawancara dengan Bapak Deden Supriatna, 21 September 2012, Pukul 11.35 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Mengenai pemberian bimbingan dan pengawasan yang dilakukan pemimpin terhadap pegawainya, Kepala Bidang Kebersihan memberikan kepercayaan kepada setiap Kepala Seksi

untuk melakukan pengawasan kepada semua pegawai ditiap seksinya masing-masing. Sedangkan proses bimbingan yang diberikan kepada semua pegawainya. Kepala Bidang selalu berupaya untuk memberikan arahan sebelum para pegawai mengerjakan tugas-tugasnya terutama tidak hanya dalam suasana yang formal tetapi juga telah terjalin hubungan kekeluargaan yang erat didalamnya.

Hal ini mengakibatkan adanya rasa kepemilikan yang tinggi dihati setiap pegawai terhadap organisasi tersebut. Pemberian sanksi yang berupa teguran atau peringatan tidak lantas membuat pegawainya acuh dan tidak menimbulkan efek jera, tetapi sebaliknya dengan teguran tersebut, pegawai merasa malu dan enggan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan kata lain hal ini juga telah melahirkan sikap loyalitas pada diri setiap pegawai.

#### **4.4.4. Pengawasan (*Controlling*)**

##### **4.4.4.1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan**

Pegawasan merupakan proses dalam mengukur kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian pula kebijakan yang tidak lepas dari pengawas kebijakan itu sendiri, karena setiap kebijakan yang telah dibuat tidak dapat dibiarkan begitu saja tetapi harus selalu ada fungsi pengawasan dari pihak berwenang untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diterapkan. Dalam

hal ini pengawasan pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu unsur penting. Sehingga pelaku pengawasan kebijakan pun harus memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya yang dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengawasan kebijakan dapat berasal dari internal dan eksternal pembuat kebijakan sehingga ada keseimbangan dan *check and balances* dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan sesuai dengan fungsinya mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional kebersihan yang ada di wilayahnya. Dengan pengawasan yang dilakukan secara terencana, diharapkan akan menghasilkan suatu pengelolaan persampahan yang procedural, teknis dan operasional sesuai dengan standar yang ada yaitu sampah pengangkutan sampah di tempat timbulan sampah, seperti pasar atau tempat-tempat penampungan sampah, kemudian diangkut oleh truck sampah atau motor sampah ke TPS yang berada di setiap kelurahan atau langsung di buang ke TPA yang telah disediakan agar kenyamanan masyarakat dan keindahan kota tidak terganggu.

Pengawasan sebagai instrument pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan yang baik akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dengan

pengawasan dapat diukur pula sejauh mana keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan atau peraturan sudah sesuai dengan yang seharusnya.

Keberhasilan suatu pengawasan tidak hanya didukung dari prosedur yang jelas, namun juga kredibilitas dan kapabilitas pelaku pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu pengawasan kebijakan tentunya akan dapat diukur dengan seberapa besar penyimpangan pencapaian tujuan tersebut dapat diminimalisir.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan terhadap pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ini, salah satunya adalah terhadap revitalisasi TPA Cipeucang yang sudah berlangsung selama dua periode ini, dan pengangkutan sampah-sampah jalanan mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Pengawasan kegiatan pengelolaan sampah secara teknis harus dilakukan dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu kegiatan aktifitas warga Kota Tangerang Selatan khususnya.

Banyak aspek teknis dalam pengawasan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ini yaitu sarana dan prasarana seperti jumlah armada truck pengangkut, motor sampah, jumlah

pegawai lapangan serta bagaimana proses pengangkutan sampah-sampah tersebut mulai dari pewadahan sampai dengan pembuangan.

Sedangkan pengawasan dari segi revitalisasi TPA Cipeucang harus lebih ditekankan, karena TPA Cipeucang tersebut merupakan tempat yang nantinya akan menjadi pembuangan terakhir sampah-sampah yang berada di kawasan Kota Tangerang Selatan dan proses pengelolaan persampahan di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan secara efektif.

Demikian fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan dalam mengawasi jalannya pengelolaan sampah dan revitalisasi TPA Cipeucang, sesuai dengan acuan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan. Proses revitalisasi TPA Cipeucang masih terkendala masalah tenaga kerja, dari peneliti temukan selama observasi dilapangan, petugas revitalisasi hanya berjumlah 10 orang, ini sangat jauh dari cukup, mengingat luasnya lahan revitalisasi TPA tersebut, sehingga proses revitalisasi tersebut hingga dua periode belum terselesaikan. Seperti apa yang diungkapkan oleh kepala proyek revitalisasi TPA Cipeucang kepada peneliti sebagai berikut:

*“Ya, disini kami hanya bekerja sebanyak 10 orang, menurut saya pribadi segitu masih kurang, minimal untuk tmpat sebesar ini kalau pengen cepet sih 20 orang lah, agar target 6 bulan yang diberikan pihak DKPP bisa kami penuhi”.*

*(Wawancara dengan Bapak Widodo, 16 Juni 2012, Pukul 13.30 WIB, di TPA Cipeucang)*

Pelaku pengawasan kebijakan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam implementasi fungsi pengawasan. Dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) khususnya tupoksi bidang kebersihan, sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, dimana setiap minggunya selalu ada pengecekan ke TKP atau TPA oleh aparatur DKPP, seperti yang diungkapkan oleh pengawas proyek revitalisasi TPA Cipeucang kepada peneliti sebagai berikut:

*"Pengawasan yang dilakukan oleh pihak DKPP sudah cukup bagus mas, walaupun tidak setiap hari tapi setiap minggunya orang DKPP pasti dateng kesini, menanyakan progress pekerjaan kami, menurut saya ini bagus karena ada komunikasi antara kami petugas lapangan dengan pihak kantor". (Wawancara dengan Bapak Tugiyono, Tanggal 16 Juni 2012, pukul 14.00 WIB, di TPA Cipeucang)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengawasan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak hanya masalah di TPA Cipeucang, proses pengawasan dilapangan atau saat pengangkutan sampah-sampah dipinggir jalan pun pihak DKPP tidak sungkan-sungkan untuk ikut turun langsung dalam proses pengangkutan sampah terkait dalam hal pengawasan, seperti yang diungkapkan Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah kepada peneliti sebagai berikut:

*"Mas evan jangan salah kira, begini-gini kami turun langsung loh ke lapangan, ikut mobil-mobil truck sampah itu, gak ada rasa gengsi, kadang kami ikut mengangkut sampah dan*

*membuang ke TPST karena kami beranggapan bahwa kami itu 1 tim, yang ngebedain itu cuma jabatan tapi tujuan kami sama". (Wawancara dengan Bapak Mohammad Ihlas, Tanggal 17 Juni 2012, Pukul 10.00 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Jadi, dengan proses pengawasan seperti yang dijelaskan diatas, maka proses prngawasan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan cukup baik, semua bagian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, khususnya dibidang Kebersihan, semua Kasi sudah menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan tupoksi pekerjaan mereka masing-masing.

#### **4.4.4.2. Peran Serta Masyarakat**

Sangat disadari bahwa dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat perlu adanya upaya besar, menyentuh manusia sebagai faktor utama keberhasilan. Untuk itu perlu adanya suatu program menyeluruh yang dilaksanakan secara intensif. Kunci efektifitas program ini adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini dimaksudkan agar masalah pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Agar partisipasi masyarakat terwujud secara nyata, perlu adanya usaha yang membangkitkan motivasi, kemampuan, kesempatan dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara berkesinambungan dan konsisten. Secara mendasar sentuhan aspek



manusia harus mencapai perubahan persepsi, sikap dan perilaku. Dengan demikian, upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat merupakan proses pendidikan, dimana masyarakat ditempatkan tidak hanya sebagai objek melainkan sedapat mungkin sebagai pelaku proses.

Pola pendidikan yang efektif akan sangat tergantung dari tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku yang telah ada saat ini di masyarakat. Pola pengelolaan dengan melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan, dalam pengoperasian dan pengawasannya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, sangat berpotensi untuk diterapkan di Kota Tangerang Selatan. Namun demikian, perlu diperhatikan pola pendekatan kepada masyarakat sehingga menumbuhkan motivasi tinggi untuk berpartisipasi.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungannya pada dasarnya bertujuan agar masyarakat turut serta aktif baik secara individu atau berkelompok dalam kebersihan lingkungan, tindakan nyata yang diharapkan adalah partisipasi aktif individual, berupa keikutsertaan setiap individu untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif. Sebagai individu di sumber, masyarakat dituntut untuk mampu mengelola sampah secara mandiri. Tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah memilah sampah atas organik dan anorganik

sedemikian hingga memudahkan dilakukannya perolehan kembali oleh pihak atau lembaga lain yang akan melakukan proses pendayagunaan sampah.

Partisipasi komunal, berupa keikutsertaan masyarakat secara komunal dalam upaya mengatasi permasalahan sampah dilingkungannya. Tindakan nyata yang dapat dilakukan misalnya melakukan usaha pengomposan komunal, dan usaha pendayagunaan sampah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada dilingkungan setempat. Proses sosialisasi program ini pun terus digenjut oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pemukiman, seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah kepada peneliti sebagai berikut:

*"Ya, saat ini kami sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan penyuluhan penanganan sampah tingkat kelurahan, kegiatan tersebut biasanya sih dilaksanakan sebulan 2 kali lah oleh teman-teman DKPP, ya semoga aja kegiatan kaya gini bisa lebih bermanfaat, khususnya buat warga supaya ngerti gimana caranya ngolah sampah, gak cuma ngehasilin sampah". (Wawancara dengan Bapak Deden, 17 September 2012, Pukul 10.30 WIB, di Kantor DKPP, Pamulang)*

Hal senada pun dibenarkan oleh Lurah Kademangan kepada peneliti sebagai berikut:

*"Ya, informasi yang saudara evan dapat benar adanya, pihak DKPP saat ini sedang menggalakan penyuluhan penanganan sampah oleh masyarakat, di desa ini baru bulan kemarin ada penyuluhan sampah, sangat bermanfaat sekali kalo menurut saya pribadi, ya semoga aja program kaya begini terus berlanjut, gak cuma sekarang-sekarang aja". (Wawancara dengan Bapak Felix, 17 September 2012, Pukul 13.30, di Kantor Kelurahan, Kademangan)*

Diharapkan dengan program ini masyarakat dapat memahami dan melaksanakan tata cara pengelolaan sampah sesuai dengan yang ditetapkan di Kota Tangerang Selatan untuk lingkungannya. Program terpadu dalam upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat, perlu dilakukan secara terus menerus, terarah dan terencana, berkesinambungan serta melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan strategi dengan pendekatan *edukatif-persuasif* dengan penerapan prinsip *bottom-up*. Kegiatan penyuluhan yang dijelaskan diatas sangat bermanfaat sekali dan menambah informasi kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh warga Kelurahan Kademangan kepada peneliti, sebagai berikut:

*“Ya, Alhamdulillah sekali mas, dengan adanya program penyuluhan tersebut, kami selaku orang awam ibaratnya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, akan manfaat pengelolaan sampah yang baik dan benar agar dapat dimanfaatkan dan menjadi nilai ekonomis kepada kita yang hidupnya menengah ke bawah”. (Wawancara dengan Bapak Taryana, 12 September 2012, Pukul 14.00 WIB, di TPA Cipeucang)*

Edukatif berkaitan dengan pendidikan atau pemaparan pengetahuan tentang sampah dan segala permasalahannya pada seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, kendala adanya perilaku masyarakat dewasa yang apatis terhadap program-program pembangunan kota akan menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kecamatan Setu kepada peneliti, sebagai berikut:

*"Dalam setiap program pasti ada yang pro dan kontra, ada yang pasif dan aktif, begitu pun karakteristik masyarakat di Kecamatan kami ini, ada saja warga yang pasif, yang cuek terhadap program penyuluhan pengelolaan sampah dari dinas tersebut, ini adalah tantangan bagi kami aparatur pemerintahan daerah untuk segera menyadarkan mereka". (Wawancara dengan Bapak Muktar Lubis, 18 September 2012, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Kecamatan Setu)*

Untuk itu perlu dicari kelompok-kelompok sasaran dengan kriteria masih memiliki idealisme dan atau belum terkotori/terpengaruhi oleh pemikiran negatif. Persuasif berkaitan dengan upaya menghadirkan contoh nyata bagi masyarakat sehingga akan menggugah perilaku dan sikap masyarakat. Selain itu peran aktif pemulung dalam kehidupan sehari-hari pun turut andil dalam proses pengelolaan sampah, terutama di TPA Cipeucang dan TPS yang berada di pasar-pasar dan pinggir jalan Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan peran serta pemulung dan juragan lapak tersebut, pada dasarnya keikutsertaan masyarakat dalam mereduksi volume sampah telah berjalan, namun belum terkoordinir. Hal ini mungkin disebabkan persepsi mengenai sampah tersebut yang tidak tepat, seperti yang diberikan oleh definisi diatas. Para pemulung membuktikan bahwa tidak semua sampah adalah barang tidak berguna, malahan sebagian dari sampah merupakan sumber penghidupan mereka. Seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu pemulung, berikut ini:

*"Ya, kami tiap hari memulung dan mengambil sampah-sampah yang dibuang disini atau kami mencari keluar, karena dari sampah tersebut kami dapat mempertahankan*

*hidup, karena sampah memiliki daya jual yang lumayan kalo kita rajin-rajin memilahnya, seperti botol-botol aqua plastik, kardus, plastik dll bisa jadi duit itu mas". (Wawancara dengan bapak Kasman, 12 September 2012, Pukul 14.30 WIB, di TPA Cipeucang)*

Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk merubah cara pandang terhadap sampah dari barang tidak berguna, menjadi barang yang dapat dimanfaatkan, dengan konsep 4-R (*replace, reduce, recycle, reuse*), sehingga persepsi sampah sebagai bahan tidak berguna dapat merubah menjadi barang yang memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Selanjutnya penyebaran informasi merupakan langkah penting yang perlu dilakukan dalam kerangka peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Pendidikan masyarakat akan menjadi efektif bila pemaparan menggunakan medis masyarakat setempat. Para inisiator yang telah hadir dari masyarakat harus diangkat untuk tampil menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Dengan demikian, penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai media masyarakat perlu dilakukan secara terprogram yang menjamin kontinuitas pemaparan.

#### 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan pembahasan dari hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun diantaranya dengan dikeluarkannya program revitalisasi TPA Cipeucang ini merupakan realisasi wujud kebijakan yang tertulis dalam rencana kegiatan atau rencana kerja bidang kebersihan 2012-2016 sehingga mampu mengurangi timbulan volume sampah yang setiap hari menjadi pemandangan sehari-hari warga Kota Tangerang Selatan dengan meninggalkan pola pengoperasian lama *Open Dumping* yang sudah tidak layak lagi, menjadi pola pengoperasian yang lebih ramah lingkungan yaitu dengan sistem *Sanitary landfill*. Metode yang dipergunakan di TPA Cipeucang adalah *Open Dumping*. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang RI. No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Bab X (larangan) Pasal 29 point 1.F, yaitu: "Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir" dan Bab XVI (Ketentuan Peralihan), Pasal 44 point 1 dan 2, yaitu: (1) "Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini. (2) "Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Proses revitalisasi TPA Cipeucang ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena anggaran pengelolaan sampah yang terbatas anggaran tersebut hanya berkisar sebesar 1 Miliar, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk revitalisasi sarana dan prasarana di TPA dan sistem instalasi pengolahan limbah. Angka itu sesuai dengan hasil hitungan konsultan IPL Independent yang digunakan BLHD Kota Tangerang Selatan dimana dengan dana tersebut akan menghasilkan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik dan ramah lingkungan disekitar warga cipeucang.

Untuk tahap awal pembangunan akan menghabiskan Rp. 595.000.000 dan tahap kedua menghabiskan kurang lebih Rp. 340.000.000. selain itu masih ada juga untuk dana operasional bulanan yang nilainya mencapai Rp.10.000.000 per bulan. Nantinya dana itu akan diasistensikan didalam anggaran DKPP sebagai penanggung jawab program di Cipeucang.

Kemudian dalam proses renovasi lahan TPA Cipeucang dilakukan secara perlahan-lahan, karena masalah pembebasan lahan TPA pun masih terkendala tarik ulur antara pemerintah dan warga pemilik tanah tersebut, hal tersebut dikarenakan masalah harga ganti rugi yang belum menemui kata sepakat sehingga pembebasan lahan ini menjadi kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Artinya proses pembuangan dan pengelolaan belum bisa dilakukan di TPA Cipeucang, sehingga tempat pembuangan akhir sampah tidak tetap dan berganti-ganti lokasi sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pihak pengelola tempat pembuangan akhir (TPA).

Adapun lokasi-lokasi pembuangan sampah akhir yang menjadi tujuan Kota Tangerang Selatan, diantaranya TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, TPA Pondokranji, TPA Jagabaya di Kabupaten Bogor, dan TPA Cipeucang sendiri. Tetapi untuk pembuangan sampah ke TPA Cipeucang sampai saat ini masih menunggu ijin operasional. Walaupun demikian, revitalisasi ini sudah memperlihatkan kondisi TPA Cipeucang yang cukup membaik meskipun belum sepenuhnya selesai, seperti gambar berikut ini:

**Gambar 4.4 Kondisi TPA Cipeucang Saat Revitalisasi**



(Sumber: Peneliti, 2012)



Dari gambar diatas sudah jelas sedang terjadi proses revitalisasi, dimana tumpukan sampah yang tadinya menggunung di TPA menggunakan teknik *Open Dumping* tersebut sekarang sudah tidak ada menjadi sistem *Sanitary Landfill*, tertutup oleh material tanah dan batu-batuan, kemudian kolam lindi untuk resapan air sampah sudah selesai dibangun, tinggal proses penyelesaian pipa-pipa tanah agar air dari tumpukan sampah dapat meresap dan mengalir ke kolam lindi tersebut.

Prasarana jalan yang ada di TPA Cipeucang adalah jalan masuk/akses yang menghubungkan TPA dengan jalan umum yang telah tersedia (lebar 4-5 m), tidak ada jalan penghubung yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain dalam wilayah TPA dan jalan operasi/kerja yang diperlukan oleh kendaraan pengangkut menuju titik pembongkaran sampah, namun saat ini pihak DKPP sedang membangun akses jalan menuju TPA, seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 4.5 Kondisi Akses Jalan Menuju TPA**



(Sumber: Peneliti, 2012)

Dari gambar di atas dapat dilihat itu merupakan proses revitalisasi pembangunan akses jalan menuju TPA Cipeucang, pembangunan jalan dan jembatan ini diproyeksikan untuk memudahkan akses keluar masuk bongkar muatan sampah truck-truck armroll, yang direncanakan pada tahun 2013 ini sudah selesai dan bisa dilalui oleh kendaraan besar.

Untuk penggunaan 81 gerobak sampah yang diberikan ke tingkat RT dan RW sudah digunakan untuk mengangkut sampah disekitar lingkungan mereka sehingga pemandangan sampah sudah sedikit berkurang. Kemudian untuk sampah-sampah yang berada dipinggiran ruko-ruko dan perumahan, dikelola oleh pihak swasta yaitu CV.Vipamas sehingga pemandangan tumpukan sampah sudah berkurang karena dikelola dengan respon yang cepat dibantu alat-alat berat pengangkut dan alat pengelolaan yang sudah memadai. Berbeda dengan kondisi di pinggiran jalan dekat pasar, tumpukan sampah masih kadang terjadi, bahkan sehari-hari sampah tidak diangkut, dikarenakan untuk sampah yang berada diareal pasar merupakan bagian dari DKPP bukan pihak swasta, dan dengan alat pengangkut yang seadanya pula, sehingga membuat lambat proses pengangkutan tersebut.

Kemudian untuk pembangunan TPST Skala RT/RW dan Kelurahan masih dalam proses pembangunan dimana dalam hal ini masih terkendala masalah pembebasan lahan terhadap masyarakat, hanya beberapa warga saja di setiap kelurahan yang mau membebaskan lahannya dan dibeli dengan harga murah kepada pihak DKPP. Sehingga sampai saat ini tercatat baru 18 TPST yang dikembangkan oleh pihak DKPP, diantaranya Perumahan Griya Serpong,

Kelurahan Pondok Betung, Pondok karya, Jombang dan Sarimulya, dimana 6 titik lokasi pembangunannya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui KSM-KSM yang telah dibentuk.

Selain dengan sistem *Sanitary Landfill*, nantinya TPA Cipeucang akan menggunakan tiga sistem pengolahan limbah cair (Lindi), diantaranya: pertama sistem sterilisasi, kedua sistem *aerobic* dan sistem pengayaan kimia (*chemical treatment*). Hal tersebut merupakan sistem pengolahan limbah cair yang juga dikembangkan di beberapa daerah maju di Indonesia seperti di Malang dan Denpasar. Dengan sistem pengolahan limbah yang diterapkan, diharapkan kedepannya tidak akan ada lagi bau yang disebabkan limbah cair dari sampah-sampah di Cipeucang. Bahkan dengan sistem pengolahan tersebut cairan hasil olahan bisa digunakan untuk hayati hidup ikan-ikan air tawar.

Saat ini pola pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, terdiri beberapa tahapan, diantaranya: tahap pengumpulan, tahap pengangkutan dan tahap pemusnahan. Dari tahap pengangkutan dilakukan oleh Dinas kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dan pihak swasta (CV. Vipamas). Pengangkutan sampah khususnya yang dilakukan oleh DKPP saat ini tidak menentu dan tidak terjadwal dengan baik, mengingat adanya kendala tempat pembuangan akhir.

Sampai saat ini permasalahan pengangkutan sampah menjadi kendala, sehingga lokasi pembuangan sering berpindah-pindah sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pengelola TPA di masing-masing tempat, seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh

pihak swasta yaitu CV.Vipamas, kendala dan masalahnya tidak serumit dan sesusah seperti yang dialami oleh DKPP, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak CV. Vipamas memiliki akses dan lokasi yang bisa ditetapkan. Untuk membedakan jenis pengangkutan sampah antara DKPP dengan pihak swasta dapat dilihat dari jenis kendaraan yang dipergunakan. Jenis *Truck Arm roll* dipergunakan oleh DKPP untuk mengangkut sampah yang berada di titik pelayanan sampah, sedangkan jenis *dump truck* digunakan oleh pihak swasta untuk mengangkut sampah yang berasal dari perumahan. Pelayanan oleh DKPP dengan penggunaan *arm roll truck* biasanya untuk melayani sampah-sampah yang berasal dari permukiman, hotel, rumah sakit, maupun lokasi komersil/niaga.

Sedangkan penggunaan *dump truck* digunakan untuk melayani daerah perumahan teratur, semisal perumahan Bintaro, alam sutera, Griya Jakarta maupun untuk melayani sampah yang berada di kawasan perdagangan. Pengangkutan sampah pasar masih dikelola dan diangkut oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Tangerang Selatan, jumlah armada angkutan sampah yang ada adalah 9 unit *arm roll truck* dengan kapasitas container  $6 \text{ m}^3$ . Untuk setiap kali beroperasi, tenaga operasional pengangkutan sampah yang terdiri atas supir dan kernet (crew). Untuk *Dump Truck* dioperasikan oleh seorang supir dan 3 (tiga) orang kernet, sedangkan untuk *Arm Roll* dioperasikan oleh seorang supir dan seorang kernet.

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, dibagi atas sumber sampah yaitu, sampah rumah tangga, sampah pasar temporer, sampah jalan,

sampah komersial, dan sampah industri. Berdasarkan pengelolaan ini, pengurangan volume baru terjadi pada saat sampah dikumpulkan di TPS, dan hanya dilakukan bagi bahan-bahan yang dapat digunakan kembali (*re-use*). Kenyataan yang ada saat ini, peran pemulung sangat berarti dalam mereduksi volume sampah mulai dari tahap pengumpulan pertama (pewadahan) sampai di TPA, terutama *re-use* dan *recycle*. Sampah organik yang dipisahkan oleh para pemulung kemudian di jual kembali kepada juragan lapak atau untuk lebih lanjut dijual kepada pabrik untuk bahan yang didaur ulang (*recycle*).

Untuk tahap pemusnahan, perlu dilakukan upaya untuk merubah cara pandang terhadap sampah dari barang tidak berguna, menjadi barang yang dapat dimanfaatkan, dengan konsep *Sanitary landfill* dan 4-R (*replace, reduce, recycle, re-use*). Adapun dalam pengoperasiannya sistem *Sanitary Landfill* ini pelaksanaannya meliputi kegiatan pendataan sampah, pengangkutan, penyebaran sampah serta pemadatan sampah dan penutupan sampah dengan material tanah.

*Replace*, proses ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah dengan meminimalkan (minimasi) penggunaan barang-barang, melalui cara menggantikan barang-barang tertentu. Sebagai contoh, penggunaan tissue diganti dengan saputangan, plastik pembungkus makanan diganti dengan daun sehingga timbulan sampah dapat berkurang. *Reduce*, konsep yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah diproduksi dengan cara pencegahan produksi kemasan yang berlebihan atau dengan meningkatkan teknik pengisian ulang (*refill*). *Recycle*, prinsipnya adalah mendaur ulang sampah melalui proses fisik, kimiawi dan biologi. Misalnya, pecahan gelas atau sampah yang berasal dari

bahan kaca diproses kembali menjadi gelas atau piring dan lain-lain, atau pecahan plastik proses menjadi ember, gayung dan lain-lain. *Re-use*, prinsipnya memakai kembali sampah secara langsung tanpa proses mengolahnya terlebih dahulu, misalnya tong sampah menjadi pot kembang dan botol plastik menjadi tempat bumbu, dan lain-lain. Konsep 4-R ini merupakan sebagai langkah awal dalam penerapan konsep *Zero Waste*, sehingga persepsi sampah sebagai bahan yang tidak berguna dapat berubah menjadi barang yang memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kenyataan dilapangannya dinilai masih belum optimal, karena dari tiga kegiatan pengelolaan yang dilakukan pihak DKPP Kota Tangerang Selatan yaitu, kegiatan revitalisasi TPA Cipeucang, pengadaan alat berat dan pembuatan TPST skala RT/RW dan Kelurahan, hanya satu kegiatan pengelolaan yang dapat berjalan yaitu kegiatan revitalisasi TPA Cipeucang.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran yang diperoleh pihak DKPP, dimana anggaran yang didapat hanya berjumlah 1 Miliar, anggaran tersebut masih jauh dari dana estimasi perencanaan biaya pengelolaan sampah yang direncanakan oleh pihak DKPP Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 3 Miliar. Maka kegiatan yang baru terlaksana hanya kegiatan revitalisasi TPA Cipeucang, dan kegiatan itupun masih dalam proses pembangunan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan harus lebih mengoptimalkan dana anggaran yang ada, tidak terfokus terhadap satu program saja, agar program-program perencanaan pengelolaan sampah lainnya seperti pengadaan sarana pengangkut sampah dan pembangunan TPST skala RT/RW dan Kelurahan dapat segera terealisasi. Karena TPST ini cukup efektif dalam mengurangi timbulan sampah, sebab pengelolaan sampah tidak hanya dari hilir saja, dari hulu sudah harus diminimalisasi timbulannya.
2. Pihak DKPP harus lebih gencar lagi dalam mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah, misalnya penyuluhan ditingkat Kelurahan atau Kecamatan menjadi sebulan dua kali, agar masyarakat mengerti bagaimana cara pengelolaan sampah dan mengetahui fungsi dan manfaat dengan menerapkan prinsip 4R (*Replace, Reduce, Recycle, Re-use*).
3. Masyarakat harus lebih aktif dalam partisipasi pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah daur ulang antara jenis organik dan non organik, agar limbah dari sampah tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari bahkan menghasilkan nilai ekonomis dan meminimalisir timbulan sampah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Hasibuan, S.P Malayu. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta .  
Bumi Aksara
- Hunger, J David. 2003. Manajemen Strategik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Manik, Sontang. 2009. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan
- Manullang, 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Strategik. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung
- Terry, George R. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Thoha, Miftah. 2004. 1983. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Grafindo
- Winardi. 2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Grafindo

### Sumber Lain:

- [www.tangerangselatankota.go.id/](http://www.tangerangselatankota.go.id/), Senin 27 Februari 2012, pukul 10.15
- [tangerangselatankota.go.id/read/news/tanggulangi-sampah](http://tangerangselatankota.go.id/read/news/tanggulangi-sampah), Kamis 1 Maret 2012,  
pukul 12.53
- <file:///C:/Users/PERSONAL/Documents/Copy.htm> Jumat 3 Maret 2012, pukul  
16.54

<http://id.wikipedia.org/wiki/201201111440530>. Senin 12 Maret 2012, pukul 15.50

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah